

352.12
W112
2 el

**ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN BANTUAN PEMERINTAH PUSAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1980 - 2000**



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Maduseno Widyoworo
C4B000116

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Maret 2003

[UPT-PUSTAK-UNDIP]

TESIS
ANALISIS PENDAPATAN ASLI DAERAH
DAN BANTUAN PEMERINTAH PUSAT
DI PROPINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1980 - 2000

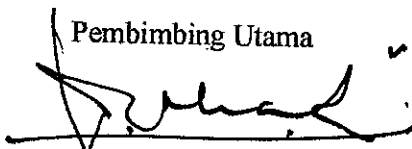
disusun oleh

Maduseno Widyoworo
C4B000116

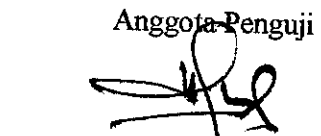
telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 10 Maret 2003
dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

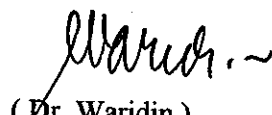
Pembimbing Utama


(Drs. G.B. Pakpahan, MM)

Anggota-Penguji


(Dr. Dwisetia Perwono, M.Sc)


Pembimbing Pendamping


(Dr. Waridin)

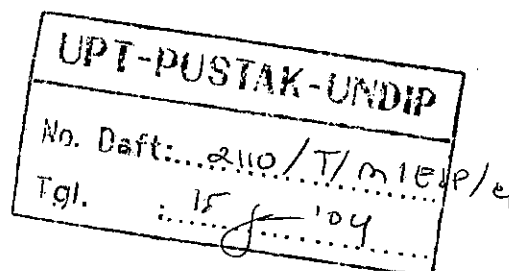
(Dr. Purbaya Budi Santoso, SE, MS)


(Drs. Y. Bagio Mudakir, MT)

Semarang, 10 Maret 2003
Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan


Dr. Syafrudin Budiningharto
NIP. 130 610 542

ii





Pernyataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, Maret 2003

(Maduseno Widyoworo)

Kupersembahkan untuk :

- **Ir. Gata Dian Asfari, MT. isteriku tercinta**
- **Ian Gilang Dewangga dan Irsha Widyadara
Kinantan, anak-anakku tersayang**
- **Kedua orang tuaku dan mertuaku.**

ABSTRACT

This research is done in the Central Java Province that is intended to analyze various variables influencing local own revenue sources and central government grant.

The tool of analyses uses multiple regressions. The *Ordinary Least Square (OLS)* method is used for analyzing local revenue sources whereas *The Two Stage Least Square (2-SLS)* is used for analyzing central government grant through single equation approach. All data was based on the secondary sources from the year 1980 – 2000 (N=21).

The result shows that (1) the amount of tourist and motor vehicle influence significantly to the increase of Central Java local own revenues; (2) Per capita income influences strongly to the Central Java local own revenue; and it also gives influential impact to the nominal amount of private sector investment in Central Java in a positive relation; (3) Road infrastructure has significant impact to the private sector investment in Central Java as well as to the central government grant poured in the region; (4) The interest rate level strongly influences private sector investment in Central Java in negative relation; and (5) The private sector investments influence the central government grant in Central Java.

The discussion concludes that to increase Central Java local own revenue needs substantial efforts to attract tourist to visit the region, among others through repairing tourist attractions and developing some new tourist objects, intensive promotion, setting up cooperation with travel bureaus and accommodations, creating safe and comfortable feeling for tourists. Beside of that, there is a need to increase allocation for repairing and developing road infrastructure, as a form of local government services to attract investors to do business in Central Java.

ABSTRAKSI

Penelitian ini dilakukan di Propinsi Jawa Tengah, bertujuan untuk menganalisis berbagai variabel yang mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan bantuan pemerintah pusat.

Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan metode *Ordinary Least Square (OLS)* untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), sedangkan untuk menganalisis Bantuan Pemerintah Pusat (BP) digunakan teknik analisis *Two Stage Least Square (2-SLS)* dengan pendekatan *single equation*. Data yang digunakan adalah data sekunder tahun 1980 – 2000 ($N = 21$).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Jumlah wisatawan dan jumlah kendaraan bermotor berpengaruh kuat terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah; (2) Pendapatan perkapita berpengaruh kuat terhadap penerimaan PAD Propinsi Jawa Tengah, dan berpengaruh kuat pula terhadap besarnya nilai investasi swasta di Jawa Tengah dengan arah hubungan positif; (3) Prasarana jalan berpengaruh kuat terhadap investasi swasta di Jawa Tengah dan secara tidak langsung berpengaruh pula terhadap bantuan pemerintah pusat di Jawa Tengah; (4) Tingkat suku bunga berpengaruh kuat terhadap investasi swasta di Jawa Tengah dengan arah hubungan negatif; dan (5) Investasi swasta berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat di Jawa Tengah.

Hal tersebut memberikan implikasi bahwa untuk meningkatkan penerimaan PAD Propinsi Jawa Tengah diperlukan upaya untuk menarik wisatawan berkunjung ke Jawa Tengah, antara lain melalui pembenahan tempat-tempat wisata, pembangunan tempat wisata baru, menggalakkan promosi, melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan, melakukan pembinaan terhadap pengusaha jasa akomodasi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan. Disamping itu perlu peningkatan alokasi dana untuk perbaikan dan pembangunan prasarana jalan sebagai wujud dari pelayanan pemerintah daerah untuk menarik investor menanamkan modalnya di Jawa Tengah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya melalui usaha keras akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 – 2000”.

Tesis ini disusun guna memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana S-2 pada Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Keberhasilan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan tulus perkenankan kami menyampaikan ucapan terima kasih khususnya kepada :

1. Dr. Syafrudin Budiningharto, Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang, yang telah banyak sekali memberikan dorongan yang memacu kami untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Drs.Y.Bagio Mudakir, MT, Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang yang juga banyak memberikan dorongan untuk segera menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini.
3. Bapak Drs G.B.Pakpahan, MM, selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak sekali memberikan bimbingan, koreksi, arahan serta masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penyelesaian penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Waridin, selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang dengan penuh perhatian telah banyak memberikan dorongan, bimbingan, koreksi, arahan dan masukan-masukan yang sangat membantu dalam rangka menyelesaikan tugas penyusunan tesis ini.
5. Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah beserta jajaran Badan/Dinas/Kantor di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang telah banyak memberikan bantuan berupa data serta informasi-informasi lain yang sangat berguna bagi penyelesaian tesis ini.
6. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang melalui diskusi-diskusi baik formal maupun non formal telah banyak memberikan masukan dan memperluas wawasan, serta Bagian Admisi yang telah berkontribusi membantu kelancaran studi penulis.
7. Rekan-rekan mahasiswa Angkatan I Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan tesis.
8. Istriku tercinta serta anak-anakku yang dengan penuh pengertian telah memberikan dorongan dalam upaya penyelesaian tesis ini
9. Semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung membantu kelancaran penyusunan tesis.

Penulis menyadari berbagai keterbatasan yang penulis miliki, oleh karenanya tesis ini masih jauh dari sempurna, namun demikian upaya ke arah penulisan yang sebaik-baiknya sesuai kaidah ilmiah yang berlaku telah penulis lakukan. Oleh karena itu kritik yang saran terhadap tesis ini sangat penulis harapkan sehingga di masa-masa mendatang dapat menulis lebih sempurna lagi.

Harapan kami hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis sendiri, bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dan bagi peneliti yang berminat dalam bidang sejenis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk mampu berbuat yang terbaik.

Semarang, Maret 2003



(Maduseno Widyoworo)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	14
1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIR- AN TEORITIS	 17
2.1. Tinjauan Pustaka	17
2.2. Penelitian Terdahulu	29
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.4. Hipotesis	35
 BAB III METODE PENELITIAN	 37
3.1. Jenis dan Sumber Data	37
3.2. Metode Pengumpulan Data	37
3.3. Teknik Analisis dan Justifikasi Statistik	38
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	 47
4.1. Kondisi Geografis	47
4.2. Penggunaan Lahan	48
4.3. Kependudukan	50
4.4. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB)	51
4.5. Pertumbuhan Ekonomi	52
4.6. Pertumbuhan Sektor Ekonomi	53
4.7. Struktur Ekonomi	55
4.8. Pendapatan Perkapita	56
4.9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	57
4.10 Investasi Swasta	58
4.11 Pengeluaran Pemerintah untuk Perbaikan/Pembuatan Prasarana Jalan	60

4.12.	Bantuan Pemerintah Pusat	61
4.13.	Laju Inflasi	72
4.14.	Pendapatan Perkapita Tahun 1980 s/d 2000	63
4.15.	Jumlah Kendaraan	64
4.16.	Jumlah Wisatawan	66
4.17.	Tingkat Suku Bunga	67
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	69
5.1.	Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)	69
5.2.	Analisis Investasi Swasta	74
5.3.	Analisis Bantuan Pemerintah Pusat	79
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	83
6.1.	Kesimpulan	83
6.2.	Saran	84
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 s/d 2001	4
Tabel 1.2. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 s/d 2001.....	5
Tabel 1.3. Realisasi Total Penerimaan Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 1989/1990 s/d 2001 ..	6
Tabel 1.4. Penerimaan PAD dan Laju Inflasi di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2000	7
Tabel 1.5. Penerimaan PAD dan Jumlah Wisatawan yang Berkunjung di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2000	8
Tabel 1.6. Penerimaan PAD dan Jumlah Kendaraan Bermotor Yang Terdaftar di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2000	9
Tabel 1.7. Penerimaan PAD dan PDRB Perkapita Jawa Tengah Tahun 1991 – 2000	10
Tabel 1.8. Nilai Investasi Swasta dan Alokasi Dana Untuk Prasarana Jalan di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2000	11
Tabel 1.9. Nilai Investasi dan Tingkat Suku Bunga di Jawa Tengah Tahun 1991 – 2000	13
Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu	32
Tabel 4.1. Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000	49
Tabel 4.2. Penduduk dan Angkatan Kerja Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000	51
Tabel 4.3. Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Propinsi Jawa Tengah Tahun 1996 s/d 2000 (Atas Dasar Harga Konstan 1993)	52

Tabel 4.4.	Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 s/d 2000	53
Tabel 4.5.	Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 s/d 2000	54
Tabel 4.6.	Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 s/d 2000 (Atas Dasar Harga Konstan 1993)	55
Tabel 4.7.	Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Jawa Tengah Tahun 1996 s/d 2000 (Atas Dasar Harga Konstan 1993) ..	56
Tabel 4.8.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 s/d 2000	57
Tabel 4.9.	Investasi Swasta di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000	59
Tabel 4.10.	Pengeluaran Pemerintah untuk Perbaikan/Pembuatan Prasarana Jalan Tahun 1979/1980 s/d 2000	60
Tabel 4.11.	Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Pusat di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1979/1980 s/d 2000	61
Tabel 4.12.	Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000	63
Tabel 4.13.	Pendapatan Regional Domestik Brutto (PDRB) Perkapita Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000	64
Tabel 4.14.	Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 atau lebih Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000	65
Tabel 4.15.	Jumlah Wisatawan Yang Menginap di Hotel Berbintang dan Melati di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000	66
Tabel 4.16.	Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Pemerintah di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000	67
Tabel 5.1.	Ringkasan Hasil Estimasi Model PAD	70
Tabel 5.2.	Matriks Koefisien Korelasi Model PAD	70

Tabel 5.3.	Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Model PAD dengan Uji Park	71
Tabel 5.4.	Ringkasan Hasil Estimasi Model Investasi Swasta (I)	75
Tabel 5.5.	Matriks Koefisien Korelasi Model Investasi Swasta (I) ...	75
Tabel 5.6.	Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Model Investasi Swasta (I) dengan Uji Park	76
Tabel 5.7.	Ringkasan Hasil Estimasi Model Bantuan Pemerintah Pusat (BP)	80

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran Teoritis	35

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai sub sistem pemerintahan Negara dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Undang-undang Nomor 25 tahun 1999). Sebagai daerah otonom, propinsi mempunyai wewenang dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Prinsip dasar pemberian otonomi didasarkan atas pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya. Atas dasar pertimbangan tersebut maka pemberian otonomi diharapkan akan lebih memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada akhirnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia selama ini, sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat masih memiliki proporsi yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan di kebanyakan daerah. Hal ini dapat dilihat di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dimana sekitar duapertiga dari total pengeluaran pemerintah daerah dibiayai dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat (Shah, et.al., 1997).

Sebagai contoh kita dapat melihat dana pembangunan nasional dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke Propinsi Jawa Tengah untuk pembangunan 20 sektor / kegiatan pada tahun 2000 tercatat sebesar 1,16 trilyun rupiah (Katalog BPS : 1403.33 Jawa Tengah Dalam Angka 2001). Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, meskipun rata-rata mengalami peningkatan sekitar 16 persen setiap tahunnya masih merupakan bagian yang sangat kecil dalam total penerimaan daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000–2004 menegaskan bahwa program penataan pengelolaan keuangan daerah ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah secara profesional, efisien, transparan dan bertanggung jawab. Sasaran yang ingin dicapai adalah semakin meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah secara signifikan dalam pembiayaan bagi kegiatan pelayanan masyarakat dan pembangunan. Hal tersebut menyiratkan bahwa keharusan pemerintah daerah diberi kesempatan untuk meningkatkan kinerja daerah yang berdaya guna dan berhasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan. Selain itu pemerintah daerah diperlukan dalam rangka memberikan jasa-jasa lokal yang menyangkut pembuatan dan pemeliharaan jalan lokal, sarana irigasi, dan sebagainya yang dapat dilaksanakan tanpa pengawasan dari pemerintah pusat (Wantara, 1997).

Di samping itu pemerintah daerah juga dapat membantu pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di daerah yang diurus oleh pemerintah pusat. Dengan demikian pemerintah daerah di Indonesia mempunyai fungsi rutin dan fungsi pembangunan. Tetapi pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah keuangan daerah, sehingga secara otomatis pemerintah daerah juga melaksanakan fungsi keuangan daerah.

Masalah keuangan daerah timbul karena keterbatasan dana yang dapat dihimpun oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam rangka membangun daerahnya. Propinsi Jawa Tengah juga tidak dapat terlepas dari masalah keuangan daerah ini sehingga diperlukan sumber penerimaan daerah yang lain dan salah satunya adalah bantuan dari pemerintah pusat.

Adapun rincian realisasi pendapatan asli daerah Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1.
Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah Di Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1989/1990 –2001
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Pajak Daerah	(%)	Retribusi Daerah	(%)	Bag. Laba BUMD	(%)	Penerimaan Dinas-2	(%)	Penerimaan Lain-lain	(%)
89/90	78,598	63,566	80.87	10,597	13.48	2,425	3.09	910	1.16	1,100	1.40
90/91	100,156	81,635	81.51	12,218	12.20	2,425	2.42	1,362	1.36	2,516	2.51
91/92	107,332	87,942	81.93	14,117	13.15	2,730	2.54	1,422	1.32	1,121	1.04
92/93	120,583	92,940	77.08	20,278	16.82	3,251	2.70	1,364	1.13	2,750	2.28
93/94	150,121	118,196	78.73	22,863	15.23	2,681	1.79	1,474	0.98	4,907	3.27
94/95	210,220	170,708	81.20	29,360	13.97	2,965	1.41	1,517	0.72	5,670	2.70
95/96	279,841	229,834	82.13	36,205	12.94	3,163	1.13	1,637	0.58	9,002	3.22
96/97	331,160	269,177	81.28	43,548	13.15	3,893	1.18	1,645	0.50	12,897	3.89
97/98	364,772	294,956	80.86	50,595	13.87	4,882	1.34	2,191	0.60	12,148	3.33
98/99	244,542	187,763	76.78	18,863	7.71	6,418	2.62	1,479	0.60	30,019	12.28
99/00	318,566	269,804	84.69	34,131	10.71	1,922	0.60	-	-	12,699	3.99
2000	505,660	392,165	77.56	40,245	7.96	2,487	0.49	-	-	70,763	13.99
2001	830,974	695,366	83.68	68,105	8.20	4,323	-	-	-	63,180	7.60
Jumlah	3,642,525	2,954,052		401,125		43,565		15,001		228,772	
Rata-2	280,194	227,235		30,856		3,351		1,154		17,598	

Sumber : BPS, 1994, 1997, 2000, 2001

Dari tabel 1.1 terlihat bahwa PAD Propinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, kecuali di tahun 1998/1999 menurun dari tahun sebelumnya dan hal ini disebabkan dampak dari krisis moneter yang terjadi.

Telah disebutkan di atas bahwa bantuan dari pemerintah pusat sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah yang cukup penting, hal ini terlihat pada data perbandingan realisasi pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat selama 12 tahun terakhir di bawah ini :

Tabel 1.2.
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat
Di Propinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990 – 2001
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Peningkatan Penurunan (%)	Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat	Peningkatan Penurunan (%)
89/90	78,598		402,412	
90/91	100,156	27.43	510,500	26.86
91/92	107,332	7.16	605,159	18.54
92/93	120,583	12.35	666,641	10.16
93/94	150,121	24.50	511,735	(23.24)
94/95	210,220	40.03	461,068	(9.90)
95/96	279,841	33.12	471,070	2.17
96/97	331,160	18.34	500,581	6.26
97/98	364,772	10.15	557,083	11.29
98/99	244,542	(32.96)	439,471	(21.11)
99/00	318,566	30.27	538,936	22.63
2000	505,660	58.73	454,022	(15.76)
2001	830,974	64.33	875,304	92.79
Jumlah	3,642,525		6,993,982	
Rata-rata	280,194		582,832	

Sumber : BPS, 1994, 1997, 2000, 2001

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun Anggaran 1993/1994, 1994/1995, 1998/1999 serta tahun 2000, Bantuan Pemerintah Pusat mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,24 %, 9,90 %, 21,11 %, dan 15,76 %, sedangkan pada tahun-tahun lainnya menunjukkan peningkatan.

Di sisi lain realisasi PAD mengalami peningkatan kecuali pada tahun Anggaran 1998 / 1999 mengalami penurunan 32,96 %.

Sedangkan realisasi total penerimaan daerah dan bantuan pemerintah pusat selama 12 tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3.
Realisasi Total Penerimaan Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat
Tahun Anggaran 1989/1990 – 2001
(Jutaan Rupiah)

Tahun	Penerimaan Daerah (TPD)	Pemerintah Pusat (BP)	BP thd TPD
89/90	534,192	402,412	75.33
90/91	702,291	510,500	72.69
91/92	834,218	605,159	72.54
92/93	702,291	666,641	94.92
93/94	834,418	511,735	61.33
94/95	1,138,624	461,068	40.49
95/96	1,324,981	471,070	35.55
96/97	1,500,398	500,581	33.36
97/98	1,452,105	557,083	38.36
98/99	636,869	439,471	69.00
99/00	886,266	538,936	60.81
2000	1,081,631	454,022	41.98
2001	1,706,278	875,304	51.30

Sumber : BPS, 94, 1997, 2000, 2001

Berdasarkan Tabel 1.3. terlihat bahwa peningkatan PAD dari tahun ke tahun kurang menggembirakan, bahkan tahun 98/99 dan 99/2000 menurun sekitar 50% dari tahun 97/98. Kemudian besarnya bantuan pemerintah pusat juga sangat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal tersebut perlu dipertanyakan mengapa PAD Propinsi Jawa Tengah peningkatannya dari tahun ke tahun tidak begitu signifikan sedangkan di sisi lain Bantuan Pemerintah pusat dari tahun ke tahun besarnya berfluktuasi.

Rendahnya penerimaan PAD dan berfluktuasinya bantuan pemerintah pusat dipengaruhi perkembangan variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan bantuan pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah.

Rendahnya penerimaan PAD dibandingkan dengan total penerimaan daerah tidak lepas dari kondisi perekonomian. Untuk mengetahui kaitan PAD dengan laju inflasi yang terjadi di Jawa Tengah, dapat dilihat dari Tabel 1.4. sebagai berikut :

Tabel 1.4.
Penerimaan PAD dan Inflasi di Jawa Tengah
Tahun 1991 - 2000

Tahun	Penerimaan PAD (Jutaan Rp)	Pertumbuhan *) (%)	Laju Inflasi (%)
1991	105,369.81	11.78	9.76
1992	116,959.68	11.00	10.18
1993	142,044.20	21.45	9.09
1994	193,786.68	36.43	5.72
1995	260,804.01	34.58	10.41
1996	317,127.46	21.60	5.70
1997	355,581.22	12.13	4.39
1998	277,417.39	(21.98)	27.37
1999	298,325.06	7.54	45.46
2000	592,767.89	98.70	1.75

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif.

Data pada Tabel 1.4. menunjukkan bahwa ketika laju inflasi sampai dengan 10% penerimaan PAD masih terjadi peningkatan, tetapi pada saat inflasi mencapai di atas 20% pada tahun 1998 penerimaan PAD menurun dengan drastis, yaitu terjadi penurunan hampir 22%. Hal ini dapat diduga bahwa laju inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Kunjungan wisata di Jawa Tengah akan dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi, karena wisatawan akan membelanjakan uangnya di Jawa Tengah. Transaksi yang terjadi antara wisatawan dengan unit-unit usaha

yang berkaitan dengan kepariwisataan, misalnya perhotelan, tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan merupakan obyek pajak, sehingga akan dapat meningkatkan penerimaan daerah dari pajak. Jumlah wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah kaitannya dengan penerimaan PAD dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 1.5.
Penerimaan PAD dan Jumlah Wisatawan Yang Berkunjung
di Jawa Tengah Tahun 1991 - 2000

Tahun	Penerimaan PAD (Jutaan Rp)	Pertumbuhan *) (%)	Jumlah Wisatawan (orang)	Pertumbuhan *) (%)
1991	105,369.81	11.78	10,922,600	(3.64)
1992	116,959.68	11.00	10,980,970	0.53
1993	142,044.20	21.45	12,034,538	9.59
1994	193,786.68	36.43	12,477,126	3.68
1995	260,804.01	34.58	14,381,614	15.26
1996	317,127.46	21.60	14,701,777	2.23
1997	355,581.22	12.13	14,466,188	(1.60)
1998	277,417.39	(21.98)	11,673,927	(19.30)
1999	298,325.06	7.54	14,840,684	27.13
2000	592,767.89	98.70	16,764,701	12.96

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif.

Berdasarkan data pada Tabel 1.5. terlihat bahwa selama 10 tahun terjadi kecenderungan pada waktu pertumbuhan jumlah wisatawan kurang dari 1% pertumbuhan PAD berkisar 11% yaitu pada tahun 1991, 1992 dan 1997, akan tetapi saat pertumbuhan jumlah wisatawan di atas 2% pertumbuhan penerimaan PAD di atas 20%. Kemudian pada saat jumlah wisatawan yang berkunjung di Jawa Tengah menurun hingga hampir 20% terjadi penurunan penerimaan PAD hampir 22% pada tahun 1998. Dengan

demikian dapat diduga bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Jawa Tengah mempengaruhi penerimaan PAD.

Penerimaan PAD Jawa Tengah sekitar 80% berasal dari pajak daerah. Obyek pajak daerah antara lain berasal dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Untuk mengetahui jumlah kendaraan bermotor kaitannya dengan penerimaan PAD dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.6.
Penerimaan PAD dan Jumlah Kendaraan Bermotor
Yang Terdaftar Di Jawa Tengah Tahun 1991 - 2000

Tahun	Penerimaan PAD (Jutaan Rp)	Pertum- buhan *) (%)	Jumlah Kendaraan Bermotor (bh)	Pertum- buhan *) (%)
1991	105,369.81	11.78	1,859,989	17.44
1992	116,959.68	11.00	2,091,204	12.43
1993	142,044.20	21.45	2,271,097	8.60
1994	193,786.68	36.43	2,374,573	4.56
1995	260,804.01	34.58	2,434,045	2.50
1996	317,127.46	21.60	2,499,216	2.68
1997	355,581.22	12.13	2,651,247	6.08
1998	277,417.39	(21.98)	2,625,250	(0.98)
1999	298,325.06	7.54	2,800,220	6.66
2000	592,767.89	98.70	3,090,320	10.36

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif.

Dari Tabel 1.6. dapat diketahui bahwa pertumbuhan PAD selama 10 tahun rata-rata positif. Demikian pula pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Namun demikian pada saat jumlah kendaraan bermotor menurun hampir 1% pada tahun 1998, pertumbuhan PAD menurun hampir 22%.

Dengan demikian diduga menurunnya PAD dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan ukuran tingkat kemakmuran masyarakat suatu wilayah. Tingkat kemakmuran akan mencerminkan tingkat kemampuan dalam membayar pajak dan retribusi yang merupakan sumber-sumber penerimaan PAD. Untuk mengetahui hubungan antara penerimaan PAD dan PDRB perkapita dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Tabel 1.7.
Penerimaan PAD dan PDRB Perkapita
Propinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2000

Tahun	Penerimaan PAD (Jutaan Rp)	Pertumbuhan *) (%)	PDRB Perkapita ADH Konstan 1983 & 1993 (Rupiah)	Pertumbuhan *) (%)
1991	105,369.81	11.78	392,499.31	6.83
1992	116,959.68	11.00	445,987.65	13.63
1993	142,044.20	21.45	1,004,820.19	125.30
1994	193,786.68	36.43	1,064,542.98	5.94
1995	260,804.01	34.58	1,140,536.46	7.14
1996	317,127.46	21.60	1,215,832.66	6.60
1997	355,581.22	12.13	1,226,211.35	0.85
1998	277,417.39	(21.98)	1,073,830.96	(12.43)
1999	298,325.06	7.54	1,096,477.26	2.11
2000	592,767.89	98.70	1,122,089.54	2.34

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif.

Data tersebut pada Tabel 1.7. memberikan gambaran bahwa selama 10 tahun pertumbuhan PAD dan PDRB perkapita positif. Hanya pada tahun 1998 PDRB perkapita menurun sebesar 12,43% dan PDRB perkapita menurun

sebesar 21,98%. Dengan demikian dapat diduga bahwa PDRB perkapita berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Kondisi prasarana jalan yang baik akan mampu menarik investor menanamkan modalnya. Hal ini berkaitan dengan efisiensi dimana jalur distribusi masuknya bahan baku maupun keluarnya hasil produksi dari suatu industri akan lancar apabila didukung oleh prasarana jalan yang memadai. Kondisi prasarana jalan dapat dilihat dari besarnya alokasi dana untuk pembangunan dan atau perbaikan jalan, dengan asumsi alokasi dana yang besar akan menghasilkan prasarana jalan yang baik. Untuk mengetahui kaitan antara nilai investasi dan alokasi dana untuk prasarana jalan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.8.
Nilai Investasi dan Alokasi Dana Untuk Prasarana Jalan
Di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1991 - 2000

Tahun	Nilai Investasi Swasta (Jutaan Rp)	Pertum- buhan *) (%)	Alokasi Dana Untuk Prasarana Jalan (Jutaan Rp)	Pertum- buhan *) (%)
1991	4,349,499.00	(25.00)	40,956,152.76	9.62
1992	1,734,429.00	(60.12)	41,604,317.38	1.58
1993	3,074,523.00	77.26	34,868,921.85	(16.19)
1994	3,243,931.00	5.51	30,985,845.19	(11.14)
1995	2,048,944.00	(36.84)	33,010,728.95	6.53
1996	1,901,448.00	(7.20)	38,790,359.47	17.51
1997	7,406,630.81	289.53	49,209,127.77	26.86
1998	2,482,396.43	(66.48)	44,246,964.30	(10.08)
1999	1,038,689.12	(58.16)	37,273,586.96	(15.76)
2000	2,451,203.42	135.99	94,224,357.56	152.79

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif.

Data dalam Tabel 1.8. menunjukkan bahwa pada saat terjadi peningkatan alokasi dana untuk prasarana jalan pada tahun 1992 sebesar 1,58% maka tahun berikutnya yaitu tahun 1993 terjadi peningkatan investasi sebesar 77,26% dari tahun sebelumnya. Kemudian ketika terjadi penurunan alokasi dana untuk prasarana jalan sebesar 16,19% pada tahun 1993 nilai investasi terjadi peningkatan yang relatif kecil dibanding tahun sebelumnya, yaitu hanya meningkat 5,51% pada tahun 1994. Kemudian pada tahun 1996 alokasi dana untuk prasarana jalan meningkat sebesar 17,51% diikuti kenaikan investasi yang sangat tinggi pada tahun 1997, yaitu sebesar 289,53%. Dengan demikian besarnya alokasi dana untuk prasarana jalan diduga berpengaruh terhadap nilai investasi swasta di Jawa Tengah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita merupakan ukuran tingkat kemakmuran dan kondisi perekonomian suatu masyarakat. Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada wilayah-wilayah yang tingkat ekonominya tinggi, karena hal ini merupakan pasar potensial bagi produknya. Dengan demikian PDRB perkapita diduga berpengaruh terhadap besarnya nilai investasi swasta.

Pada umumnya investor akan tertarik untuk berinvestasi pada saat suku bunga rendah, dengan pertimbangan investasi di sektor usaha masih lebih menguntungkan dibandingkan dengan jika ditabung atau didepositokan. Gambaran hubungan antara nilai investasi swasta dengan tingkat suku bunga dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1.9.
Nilai Investasi dan Tingkat Suku Bunga
Di Jawa Tengah Tahun 1991 - 2000

Tahun	Nilai Investasi Swasta (Jutaan Rp)	Pertum- buhan *) (%)	Tingkat Suku Bunga (%)
1991	4,349,499.00	(25.00)	15.32
1992	1,734,429.00	(60.12)	12.09
1993	3,074,523.00	77.26	8.72
1994	3,243,931.00	5.51	9.87
1995	2,048,944.00	(36.84)	13.62
1996	1,901,448.00	(7.20)	14.13
1997	7,406,630.81	289.53	30.52
1998	2,482,396.43	(66.48)	37.84
1999	1,038,689.12	(58.16)	23.70
2000	2,451,203.42	135.99	12.34

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, berbagai tahun

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif.

Data dalam Tabel 1.9. menunjukkan bahwa pada kondisi normal ketika suku bunga tinggi (di atas 10%) maka investasi menurun seperti dapat kita lihat pada tahun 1991 ketika suku bunga 15,32% terjadi penurunan investasi sebesar 25%, kemudian ketika suku bunga sebesar 12,09% pada tahun 1992, investasi menurun sebesar 60,12%. Selanjutnya tingkat suku bunga pada tahun 1995 dan 1996 masing-masing 13,62% dan 14,13% terjadi penurunan investasi sebesar 36,84% dan 7,20%. Sebaliknya pada waktu suku bunga sebesar 8,72% dan 9,87% pada tahun 1993 dan 1994, terjadi peningkatan investasi sebesar 77,26 dan 5,51%. Dengan demikian dapat diduga bahwa tingkat suku bunga berpengaruh terhadap minat investor untuk menanamkan modalnya.

Besarnya nilai investasi merupakan salah satu ukuran bagi pemerintah pusat untuk memberikan bantuan dana. Dana bantuan pemerintah pusat ini antara lain berfungsi sebagai insentif bagi daerah untuk memacu investasi. Jadi semakin tinggi nilai investasi swasta yang ditanamkan di suatu daerah, semakin tinggi pula daerah yang bersangkutan menerima dana bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian investasi berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.

Berdasarkan kajian terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Analisis pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat di Propinsi Jawa Tengah tahun 1980-2000”.

1.2. Rumusan Masalah

Peningkatan PAD di Propinsi Jawa Tengah belum memiliki porsi yang cukup besar dalam total penerimaan daerah, sedang di sisi lain bantuan pemerintah pusat kepada daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pembiayaan pembangunan di daerah besarnya sangat berfluktuasi. Jadi permasalahannya adalah rendahnya penerimaan PAD dan berfluktuatifnya bantuan pemerintah pusat. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam memprediksi besarnya penerimaan daerah dalam penyusunan anggaran daerah. Untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi penerimaan PAD dan bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Apakah laju inflasi, jumlah wisatawan, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB perkapita berpengaruh terhadap penerimaan PAD dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel tersebut.
- 2) Apakah tingkat suku bunga, PDRB perkapita dan biaya pembangunan prasarana jalan berpengaruh terhadap investasi swasta dan seberapa besar pengaruh masing-masing variabel tersebut.
- 3) Apakah investasi berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat.

Penelitian tersebut perlu dilakukan mengingat dalam pengambilan keputusan, gambaran kuantitatif memegang peranan yang cukup penting, sementara itu penelitian sejenis belum banyak dilakukan.

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis variabel-variabel yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah.
2. Menganalisis variabel yang mempengaruhi penerimaan bantuan pemerintah pusat

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis :
 - a) Memberikan sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu ekonomi publik dan regional khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat.

- b) Menambah referensi dan khasanah pustaka tentang analisis faktor faktor yang mempengaruhi PAD dan bantuan pemerintah pusat.

2) Manfaat praktis :

Dengan mengetahui pengaruh masing-masing faktor yang diteliti dapat dipakai sebagai informasi bagi Propinsi Jawa Tengah dalam perumusan kebijakan peningkatan sumber-sumber keuangan daerah.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

Untuk mengetahui sejauh mana variabel-variabel ekonomi berpengaruh terhadap PAD dan Bantuan Pemerintah Pusat, maka perlu dilakukan penelitian. Didalam melakukan penelitian tentu tidak terlepas dari telaah pustaka literatur-literatur maupun penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu.

Dengan telaah pustaka diharapkan dapat memberikan justifikasi sehingga hipotesis dapat diajukan melalui kerangka pemikiran teoritis serta dapat dianalisis dengan menggunakan metode penelitian tertentu.

2.1. Tinjauan pustaka

Tinjauan pustaka meliputi Teori Desentralisasi, Bentuk dan Fungsi Pemerintah Regional, Pendanaan Pemerintah Regional dan Rumus Alokasi Dana Pemerintah Pusat kepada Daerah.

2.1.1. Teori Desentralisasi.

Musgrave (1976) menyatakan bahwa keberadaan sektor publik adalah untuk menjalankan beberapa fungsi yang terkait dengan tiga permasalahan ekonomi, yaitu : Pencapaian distribusi yang merata, Pemeliharaan stabilitas (pertumbuhan) ekonomi, dan alokasi sumber daya yang efisien. Musgrave mendeteksi dua faktor yang bisa dijadikan acuan untuk menentukan apakah

secara ekonomi suatu fungsi itu akan lebih baik dilaksanakan terpusat ataukah didesentralisasikan.

Pertama adalah faktor eksternalitas, semakin rendah eksternalitas dari pengadaan suatu barang publik maka semakin rendah pula insentif untuk dilakukannya sentralisasi, dan sebaliknya. Faktor kedua berkaitan dengan kepekaan dan preferensi. Diyakini bahwa, pada dasarnya, pemerintahan pada tingkat yang lebih rendah (pemerintah daerah) akan lebih memahami keinginan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan kedua faktor ini dapat disimpulkan bahwa, secara umum fungsi stabilisasi itu akan lebih baik dilakukan di pusat, sementara fungsi alokasi dan distribusi akan lebih baik jika didesentralisasikan. Namun demikian, khususnya untuk fungsi distribusi, khususnya di negara Kesatuan, cukup besar peluang bahwa ini justru akan lebih baik jika ditangani pusat mengingat adanya unsur pemerataan (*equity*) yang mesti dicapai.

2.1.2 Bentuk dan Fungsi Pemerintah Regional.

- a. Bentuk-bentuk pokok sistem pemerintahan berkaitan dengan hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menurut Sady (1986) ada empat bentuk pokok sistem pemerintahan berkaitan dengan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Ibnu Syamsi, 1986), yaitu : (1) sistem pemerintahan daerah komprehensif (*comprehensive local government system*), (2) sistem berpasangan

(*partnership system*), (3) sistem dualistic (*dual system*), dan (4) sistem administrasi terpadu (*integrated administrative system*).

Lains (1985) menegaskan bahwa suatu sistem pemerintahan daerah yang kuat dan lebih efektif sangat diperlukan dalam rangka memberikan jasa-jasa teknis kepada rakyat Indonesia di daerah-daerah seperti jasa pertanian, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Fungsi Pemerintah Regional :

Fungsi pemerintah regional (daerah), menurut Davey (1988) ada 5, yaitu: (1) fungsi pelayanan, (2) fungsi pengaturan, (3) fungsi pembangunan, (4) fungsi perwakilan, (5) fungsi koordinasi dan perencanaan.

2.1.3. Pendanaan Pemerintah Regional.

Pemerintah regional dalam melaksanakan fungsi-fungsi tersebut di atas memerlukan sumber-sumber dana. Salah satu sumber dana adalah alokasi anggaran pemerintah pusat. Sumber dana semacam ini sering dinyatakan sebagai pemindahan (*transfer*) yang meliputi beberapa jenis (Davey, 1988), yaitu : (a) anggaran pusat (*votes*), (b) bantuan pusat (*grant*), (c) bagi hasil pajak (*tax sharing*), (d) pinjaman, dan (e) penyertaan modal.

Menurut Musgrave & Musgrave (1984), ada suatu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang dikenal dengan nama *revenue sharing* (bagi hasil). *Revenue sharing* dibedakan

menjadi yang bersyarat (*conditional, categorical, strings-attached*) atau *conditional grant in aid* dan tidak bersyarat (*unconditional, non categorical, no-string-attached*) atau *un-conditional grant in aid*. *Conditional grant in aid* adalah bantuan pemerintah atasan terhadap pemerintah di bawahnya dengan menyebut persyaratan-persyaratan atau peraturan-peraturan yang bersifat spesifik, misalnya untuk perbaikan jalan, pemberian tunjangan pensiun, bantuan inpres. Sedangkan *unconditional grant in aid* adalah bantuan pemerintah atasan terhadap pemerintahan bawahan dengan tidak menyebutkan syarat-syarat atau penggunaan khusus.

Di samping itu ada jenis bantuan yang lain yaitu *matching grant* dan *non matching grant* (Musgrave & Musgrave, 1984; Homme, 1987). Yang dimaksud dengan bantuan tak bersyarat (*nonmatching grant*) adalah bantuan yang diberikan secara bebas untuk menganggarkan pengeluaran si penerima yang dalam hal ini pemerintah daerah. Bantuan bersyarat (*matching grant*) adalah bantuan yang diberikan langsung oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, misalnya untuk memperbaiki proyek-proyek yang diberikan pemerintah pusat atau daerah. *Matching grant* merupakan dana yang sifatnya selektif yang memberikan provisi pada barang-barang modal.

2.1.4. Rumus Alokasi Dana Pemerintah Pusat kepada Daerah.

a. Rumus alokasi dana teoritik,

Rumus alokasi dana teoritis digunakan untuk menyusun program bantuan pemerintah pusat bagi propinsi diasumsikan bahwa propinsi tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah selain apa yang telah digariskan oleh rumus ini. Keseluruhan alokasi dana dibagi menjadi 2 bagian pokok, yaitu : Bagian pertama, untuk membiayai kebutuhan propinsi, dan bagian kedua, untuk memberikan rangsangan berupa tambahan kegiatan propinsi yang dikehendaki.

Dalam bagian pertama akan disediakan jatah rutin untuk hal-hal yang mutlak pada anggaran rutin, seperti upah untuk pegawai sektor umum dan pegawai di bidang pemeliharaan infrastruktur, terutama jalan propinsi dan pengairan propinsi. Di samping itu perlu disediakan jatah standar minimum jasa seperti pendidikan, kesehatan, perumahan dan kesempatan kerja. Ini berarti perlu ditentukan standar dasar nasional, misalnya jumlah bangku sekolah, atau jumlah tempat tidur rumah sakit bagi setiap seribu penduduk. Propinsi dengan jasa di bawah minimum akan menerima tambahan dana untuk mencapai standar yang diperlukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Bagian pertama untuk dana tersebut (dana untuk kegiatan rutin) dinyatakan dengan rumus (Shaw, 1987) :

$$G_1 = W + u (aR + bI) + ((N + E) / Y)$$

di mana :

G_1 : dana rutin untuk daerah,

W : upah sektor umum propinsi yang disetujui Depdagri,

R : jumlah propinsi, I merupakan hektar tanah yang diairi,

N : ukuran nasional minimum untuk penyediaan jasa,

E : ukuran standar yang ada untuk jatah propinsi

(N dan E diberikan dalam pengertian moneter),

Y : jumlah tahun yang diperlukan untuk penyesuaian, dan

b : satuan moneter tetap (sekian banyak Rp per mil / hektar)

u : indeks luas menyangkut biaya pemeliharaan yang lebih tinggi.

Bagian kedua dari keseluruhan dana, G_2 (dana pembangunan bagi daerah) akan merangsang perbaikan prestasi propinsi dalam hal perbaikan daerah, produksi barang ekspor, dan pembatasan jumlah penduduk dengan memperhitungkan adanya kemungkinan terjadi migrasi. Rumus untuk alokasi dana bantuan pembangunan bagi daerah adalah (Shaw, 1987) sebagai berikut:

$$G_2 = [(cT + dX + epA) / (P + M)] * [Y_n / Y_p]$$

di mana :

G_2 = dana pembangunan bagi daerah,

T = prosentase peningkatan penghasilan tahunan yang berasal dari pajak,

X = prosentase peningkatan penghasilan tahunan dari ekspor,

A = jumlah pengeluaran investasi daerah yang telah dicapai
propinsi yang bersangkutan,

c & d = satuan-satuan moneter tetap dalam rupiah,

e = koefisien yang memperlihatkan bagian pengeluaran daerah
yang terkoordinir yang dilaksanakan propinsi dengan biaya
pemerintah pusat.

Dengan demikian propinsi akan memperoleh tambahan bantuan dari pemerintah pusat karena peningkatan ekspor, penghasilan yang lebih banyak dari pajak, dan karena propinsi melaksanakan pengeluaran investasi daerah yang terkoordinasi dan yang telah disetujui oleh pemerintah pusat, Y_n/Y_p merupakan perbandingan perkapita propinsi yang bersangkutan, dengan demikian menjamin supaya dana yang diterima berbanding terbalik dengan jumlah pendapatan perkapita. P merupakan prosentase pertambahan penduduk alamiah dan M merupakan arus migrasi masuk netto. Agar diperoleh hasil yang berarti dari rumus alokasi dana tersebut, harus ditentukan batasan bahwa $P + M$ tidak sama dengan nol.

b. Rumus Alokasi Dana Praktis

Rumus alokasi dana teoritik yang dikemukakan di atas secara khusus didasarkan pada adanya kesulitan pelaksanaan dan

tidak mengasumsikan adanya keterbatasan data. Dalam praktek, keterbatasan data sangat dirasakan, terutama mengenai perkiraan tahunan atas pertambahan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan perkapita. Karena keterbatasan tersebut, maka relatif lebih mudah untuk membagi propinsi-propinsi menjadi daerah yang relatif tinggi, sedang dan rendah menurut pendapatan perkapita. Dengan demikian dapat dikemukakan rumus alokasi dana yang praktis (Shaw, 1987) sebagai berikut:

$$G = [W + u (aR + bI) + (N - Y + eT + dX + epA \parallel \alpha, \beta, \text{ atau } \delta]$$

di mana : $\alpha < 1$, $\beta = 1$, $\delta = 1$.

Rumus ini mempunyai keuntungan tertentu, yaitu dana pemerintah pusat dibagi menjadi dua bagian, bagian pertama untuk menanggung biaya rutin propinsi, dan yang kedua memberi rangsangan untuk meningkatkan prestasi dalam kaitan dengan sasaran-sasaran nasional.

c. Dana Perimbangan :

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Undang-undang No 25 tahun 1999).

Dana Perimbangan ini terdiri dari :

1. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Penerimaan dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi;
3. Dana Alokasi Khusus, yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.

2.1.5. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Hubungan antara PAD dengan PDRB merupakan hubungan secara fungsional, karena PDRB merupakan fungsi dari PAD. Dengan meningkatnya PAD maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya.

2.1.6. Bantuan Pemerintah Pusat dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Bantuan Pemerintah Pusat merupakan sumber dana pembangunan ekonomi bagi daerah. Bantuan yang diberikan dalam bentuk subsidi, digunakan untuk membiayai kegiatan rutin, sedangkan

dana bantuan yang digunakan untuk pengeluaran pembangunan diharapkan mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena dengan pengeluaran pemerintah daerah tersebut diantaranya melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, listrik dan air bersih.

2.1.7. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data PDRB, baik atas dasar harga konstan maupun atas dasar harga berlaku. PDRB didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (lihat : Katalog BPS : 9200.33 tentang Pendapatan Regional Jawa Tengah tahun 1999). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun 1983 dan tahun 1993. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi.

2.1.8. Hubungan Investasi dan Suku Bunga.

Investasi atau penanaman modal merupakan suatu hal yang penting bagi kelangsungan hidup suatu kegiatan usaha, karena investasi ini dibutuhkan sebagai faktor penunjang dalam memperlancar proses produksi.

Menurut Boediono (1990 : 40), investasi adalah pengeluaran oleh produsen untuk pembelian barang dan jasa untuk tujuan investasi, yaitu untuk penambahan stok di gudang atau perluasan pabrik-pabrik. Sedangkan menurut Soeparmoko (1991:80), investasi adalah pengeluaran yang ditujukan untuk menambah atau mempertahankan persediaan kapital. Persediaan kapital terdiri dari : pabrik, mesin-mesin kantor dan barang tahan lama yang hanya dipakai dalam proses produksi, termasuk rumah dan persediaan barang-barang yang belum terjual atau dipakai pada tahun yang bersangkutan.

Menurut teori Keynes investasi tergantung pada suku bunga. Hal ini didasarkan pada pemikiran akan adanya harapan hasil bersih yang akan diperoleh di masa yang akan datang. Makin tinggi tingkat suku bunga makin tinggi pula biaya untuk meminjam (*cost of borrowing*) untuk membiayai investasi, sehingga tingkat keuntungan yang diperoleh akan menurun dan akan berakibat menurunkan investasi.

Model Keynes berasumsi bahwa suku bunga melakukan penyesuaian untuk menyamakan antara penanaman dana investasi yang

berasal dari tabungan dan permintaan dana investasi untuk kepentingan investasi. Keynes berpendapat bahwa suku bunga baik suku bunga riil (suku bunga nominal dikurangi laju inflasi) maupun suku bunga nominal, dapat ditentukan tanpa tergantung pada jumlah uang yang beredar (dinamakan *Classical Dichotomy*).

Dalam teori makro, Keynes berpendapat bahwa keputusan untuk melaksanakan investasi tergantung pada perbandingan antara besarnya keuntungan yang diharapkan (yang dinyatakan dalam persentase per satuan waktu), biaya penggunaan dan tingkat suku bunga. Tingkat keuntungan yang diharapkan ini dinamai *Marginal Efficiency of Capital (MEC)*. Bila keuntungan yang diharapkan (*MEC*) lebih besar dari tingkat suku bunga, maka investasi dapat dilaksanakan, demikian pula sebaliknya. Tingkat bunga yang lebih tinggi daripada *MEC* akan membuat investor yang memiliki dana sendiri memilih untuk meminjamkan dananya daripada menggunakannya untuk membeli barang modal karena akan menanggung kerugian. Bila *MEC* sama dengan tingkat suku bunga, maka investasi boleh dilaksanakan dan boleh juga tidak.

2.1.9. Hubungan antara Inflasi dengan investasi

Menurut Sadono Sukirno (1994 : 15), inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku umum dalam suatu perekonomian. Inflasi menimbulkan beberapa akibat

buruk kepada individu, masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Prospek pembangunan perekonomian secara keseluruhan dalam jangka panjang akan menjadi semakin buruk sekiranya inflasi tidak dapat dikendalikan. Inflasi yang bertambah serius tersebut cenderung untuk mengurangi investasi yang produktif sehingga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

2.2. Penelitian terdahulu

Studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya antara lain dilakukan oleh Bawazier (1988 : 1-248) tentang hubungan fiskal antara pusat dan daerah di Indonesia, mengemukakan; pertama, keuangan daerah masih sangat tergantung pada bantuan pusat. Kedua, bantuan pusat dalam berbagai bentuk belum sanggup mengobati disparitas antar daerah. Ketiga, hasil studi menyarankan mengenakan pajak yang memenuhi kriteria sebagai pajak yang baik.

Booth (lihat Devas et.al., 1989 : 200-220), mengungkapkan bahwa sistem bantuan yang berkembang selama ini mengandung kelemahan. Pertama, sistem bantuan tersebut membuat daerah sangat tergantung dari bantuan pemerintah pusat, tanpa berupaya keras untuk menggali potensi daerah. Kedua, jumlah bantuan yang diberikan untuk setiap daerah ditentukan oleh pemerintah pusat dengan kriteria yang sering tidak jelas dan tidak dikaitkan dengan tolok ukur kebutuhan daerah, sehingga menimbulkan masalah bagi daerah terutama yang berada di luar Jawa.

Selanjutnya Hirawan (1993 :295-315), menyimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji statistik yang signifikan untuk variable PDRB.

Penelitian Aziz (1994 : 205-228), mengemukakan, bahwa alokasi dana dari pemerintah pusat sangat penting dalam mempengaruhi proses perkembangan ekonomi daerah. Dari hasil analisis dengan menggunakan model ekonometri simultan dinamis, menunjukkan bahwa apabila alokasi dana naik dan sumbangan sektor primer menurun, maka perubahan struktural dapat dipercepat. Namun sebaliknya pengaruh skenario inpres alternatif tidak signifikan atau dampak perluasan sumbangan inpres cenderung tidak berpengaruh terhadap daerah yang memiliki PDRB perkapita yang tinggi.

Penelitian Wantara (1997) dengan menggunakan metoda 2SLS dan ILS di daerah penelitian Yogyakarta menyimpulkan bahwa, pertama; jumlah wisatawan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan juga berpengaruh langsung terhadap variasi besarnya bantuan pemerintah pusat dengan arah hubungan yang positif. Kedua, adanya perubahan pendapatan regional perkapita akan berdampak langsung terhadap investasi swasta dan pendapatan tersebut akan berdampak penggandaan (*impact multiplier*) terhadap besarnya jumlah bantuan pemerintah pusat, sehingga apabila PDRB perkapita meningkat maka akan berdampak pada peningkatan investasi swasta. Ketiga,

perubahan suku bunga ternyata tidak berdampak langsung secara signifikan terhadap variasi perubahan variasi investasi swasta. Keempat, prasarana jalan ternyata mempunyai dampak langsung terhadap investasi swasta dan bantuan pemerintah pusat dengan hubungan positif. Kelima, bahwa jumlah kendaraan bermotor berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah serta terhadap prasarana jalan dengan sifat hubungan positif, artinya bahwa bila jumlah kendaraan meningkat maka prasarana jalan juga perlu ditingkatkan.

Hinrichs (1965, 1966) dan Musgrave (1969) dalam Musgrave and Musgrave (1989), telah membuktikan hipotesis yang menyatakan bahwa rasio pajak total dan sumbangan dari pajak langsung dalam penerimaan pajak total naik dengan meningkatnya pendapatan per kapita.

Alfian Lains (1985), dalam kajian terhadap data historis tentang pendapatan daerah dalam ekonomi orde baru diperoleh temuan bahwa relatif rendahnya penerimaan pajak daerah dan pajak sentral di Indonesia erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah.

Widhihastuti (2000) dalam penelitiannya tentang Pendapatan Asli Daerah di Propinsi Jawa Timur menemukan bahwa PDRB, jumlah kendaraan dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Jaka Sriyana (1999) menguji hipotesis bahwa besar kecilnya pendapatan asli daerah sangat ditentukan oleh pendapatan perkapita dan jumlah penduduk Analisis terhadap 27 propinsi di Indonesia ditemukan

bahwa pendapatan perkapita dan jumlah penduduk merupakan variabel yang cukup penting menentukan PAD. Namun dari model yang digunakan ditemukan nilai R^2 sebesar 0,56 sehingga dapat diartikan masih ada variabel lain di luar model sebesar 44% yang ikut menentukan pajak daerah.

Secara ringkas penelitian terdahulu dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun	Hasil Penelitian
1.	Bawazier (1988)	<ul style="list-style-type: none"> • Keuangan daerah masih sangat tergantung pada bantuan pusat • Bantuan pusat belum sanggup mengobati disparitas antar daerah
2.	Booth (1989)	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem bantuan membuat daerah sangat tergantung bantuan pemerintah pusat • Jumlah bantuan ditentukan pemerintah pusat dengan kriteria yang sering kurang jelas
3.	Hirawan (1993)	Bantuan pemerintah pusat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah.
4.	Aziz (1994)	Apabila alokasi dana naik dan sumbangan sektor primer menurun maka perubahan struktural dapat dipercepat.
5.	Wantara (1997)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah wisatawan berdampak langsung terhadap peningkatan PAD dan berpengaruh langsung terhadap variasi besarnya bantuan pemerintah pusat. • Perubahan pendapatan regional perkapita berdampak langsung terhadap investasi swasta dan akan berdampak pengganda terhadap besarnya jumlah bantuan pemerintah pusat. • Prasarana jalan mempunyai dampak langsung terhadap investasi swasta dan bantuan pemerintah pusat. • Jumlah kendaraan bermotor berdampak langsung terhadap peningkatan PAD.

No.	Peneliti, Tahun	Hasil Penelitian
6.	Musgrave (1969)	Rasio pajak total dan sumbangan dari pajak langsung dalam penerimaan total naik dengan meningkatkan pendapatan perkapita.
7.	Alfian Lains (1985)	Rendahnya penerimaan pajak daerah dan pajak sentral di Indonesia erat kaitannya dengan pendapatan masyarakat yang masih rendah.
8.	Widhihastuti (2000)	PDRB, jumlah kendaraan dan jumlah wisatawan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
9.	Jaka Sriyana (1999)	Pendapatan perkapita dan jumlah penduduk merupakan variabel yang cukup penting menentukan PAD.

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Hasil tinjauan pustaka dan kajian terhadap studi terdahulu diketahui bahwa pendapatan pemerintah regional bersumber dari pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat.

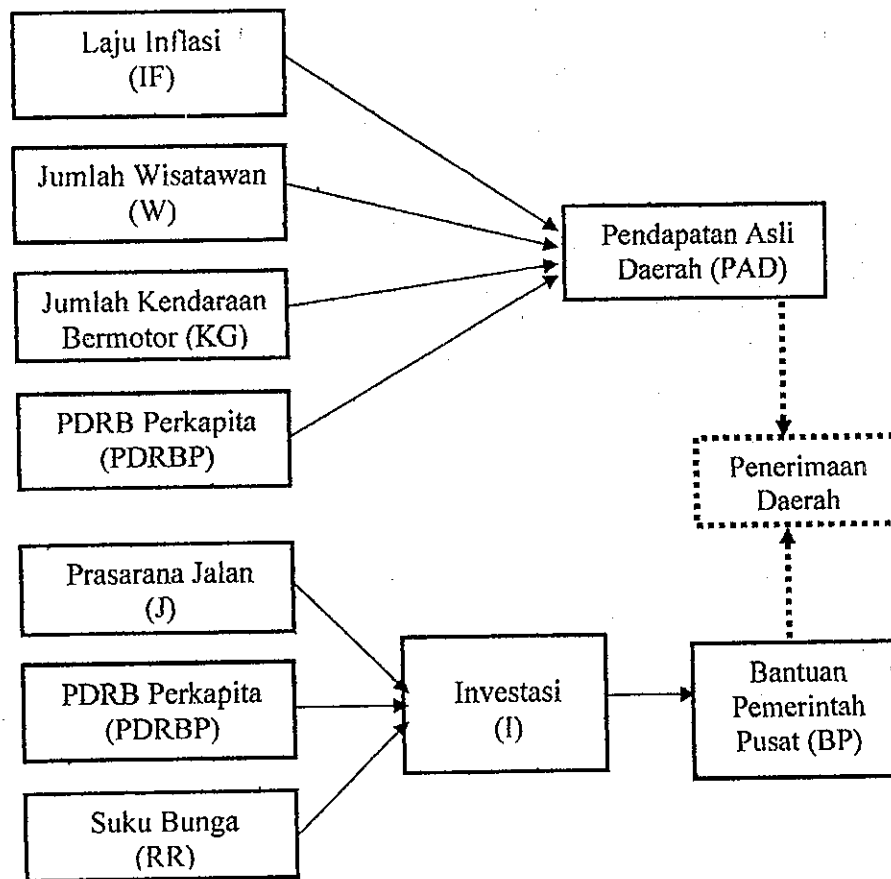
Tinggi rendahnya PAD ditentukan oleh laju inflasi, pendapatan perkapita masyarakat, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan. Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD karena dengan kenaikan harga daya beli masyarakat menurun dan kemampuan masyarakat dalam membayar pajakpun akan menurun. Pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi pendapatan perkapita masyarakat akan menyebabkan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat dalam membayar pajak sebagai bagian dari PAD. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak akan berpengaruh terhadap semakin besarnya penerimaan PAD karena pajak atas kendaraan bermotor merupakan obyek pajak propinsi yang merupakan salah satu bagian dari

PAD. Jumlah wisatawan yang berkunjung akan berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, karena pengeluaran para wisatawan akan menggerakkan sektor-sektor ekonomi yang merupakan obyek pajak dan retribusi yang merupakan bagian dari penerimaan PAD.

Berdasarkan rumus alokasi dana bantuan pemerintah pusat diketahui bahwa penetapan alokasi dana pemerintah pusat antara lain didasarkan atas besarnya investasi, prasarana jalan, jumlah wisatawan dan PDRB perkapita. Sedangkan investasi itu sendiri dipengaruhi oleh tingkat suku bunga, pendapatan perkapita dan prasarana jalan. Adapun alokasi dana pemerintah untuk prasarana jalan dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang akan di wilayah yang bersangkutan.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat digambarkan hubungan pengaruh di antara variabel-variabel penelitian dalam kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Hipotesis

Hipotesis penelitian yang akan diuji kebenarannya melalui penelitian empiris dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Laju inflasi berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah; PDRB perkapita, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Propinsi Jawa Tengah.

- 2) Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta; PDRB perkapita dan prasarana jalan berpengaruh positif terhadap Investasi swasta di Propinsi Jawa Tengah.
- 3) Investasi swasta berpengaruh positif terhadap bantuan pemerintah pusat di Propinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini merupakan data tahunan selama 21 tahun mulai tahun 1980 sampai dengan 2000, diambil data tahun tersebut dikarenakan keterbatasan sumber data dan juga rumus yang dipergunakan dalam penetapan bantuan pemerintah pusat sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 mengalami perubahan.

Data tersebut bersumber dari publikasi, laporan dan dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diperoleh antara lain dari :

- 1) BPS Propinsi Jawa Tengah
- 2) Dipenda Propinsi Jawa Tengah.
- 3) Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah
- 4) Sekretariat Daerah Propinsi Jawa Tengah.
- 5) Instansi lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Wawancara, yaitu wawancara langsung dengan petugas / pejabat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Melalui wawancara ini diharapkan

diperoleh data tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat sebagai pelengkap.

- 2) Dokumentasi dari berbagai publikasi, laporan, buku literatur, majalah, jurnal dan makalah yang mendukung penelitian.

3.3. Teknik Analisis dan Justifikasi Statistik

Alat analisis yang digunakan adalah : (1) Regresi linier berganda/ *Ordinary Least Square* (OLS), dan (2) *Two Stage Least Square* (2-SLS).

Model matematis dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$PAD = f (IF, W, KG, PDRBP) \dots\dots\dots (3.1)$$

$$I = f (J, RR, PDRBP) \dots\dots\dots (3.2)$$

$$BP = f (\hat{I}) \dots\dots\dots (3.3)$$

di mana :

PAD = pendapatan asli daerah

I = investasi swasta

BP = bantuan pemerintah pusat

IF = laju inflasi

W = jumlah wisatawan

KG = jumlah kendaraan

PDRBP = PDRB perkapita

J = prasarana jalan

RR = tingkat suku bunga

Untuk mengestimasi persamaan (3.1) akan dipakai alat analisis regresi berganda, sedangkan untuk menganalisis persamaan (3.2) dan (3.3) akan dilakukan dengan teknik *two stage least square* (2-SLS) dengan pendekatan *single equation* seperti yang dijelaskan oleh Gujarati (1995).

Adapun justifikasi statistik yang dilakui adalah uji t dan uji F serta koefisien determinasi (R^2) dari model regresi (Gujarati, 1995).

Prosedur estimasi 2-SLS dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tahap I : Mengestimasi persamaan (3.2) dengan OLS, setelah diperoleh hasil estimasi maka dependen variabel (I) kemudian diprediksi (\hat{I}).
- 2) Tahap II : Mengestimasi $BP = f(\hat{I})$ (persamaan 3.3) dengan teknik OLS.
- 3) Memberikan justifikasi statistik atas hasil estimasi 2-SLS dan menginterpretasikan arti ekonomi.

3.3.1. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini digunakan definisi operasional variabel sebagai berikut :

PAD = Realisasi penerimaan Propinsi Jawa Tengah yang bersumber dari daerah sendiri dalam jutaan rupiah dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.

I = Nilai Investasi PMA dan PMDN di Jawa Tengah dalam jutaan rupiah mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.

- J = Jumlah pengeluaran untuk perbaikan jalan dan pembuatan jalan baru dalam jutaan rupiah di Jawa Tengah mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000.
- B P = adalah alokasi dana pembangunan nasional di Jawa Tengah dalam jutaan rupiah mulai tahun 1980 sampai dengan 2000
- IF = adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus, diukur melalui laju inflasi rata-rata dari Kota Semarang, Tegal dan Purwokerto.
- PDRBP= adalah PDRB Jawa Tengah atas harga konstan 1983 dan 1993 dibagi dengan jumlah penduduk Jawa Tengah mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000
- KG = adalah jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 atau lebih yang terdaftar di Jawa Tengah mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000
- W = adalah jumlah wisatawan domestik dan wisatawan asing yang berkunjung dan menginap di hotel di Jawa tengah mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000
- RR = Tingkat Suku Bunga deposito dalam rupiah kelompok Bank Pemerintah tertinggi tahunan, mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000

3.3.2. Prosedur Analisis

Analisis dilakukan dengan bantuan paket program SPSS Versi 10, yaitu dengan melakukan estimasi menggunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS).

3.3.3. Analisis Statistik

Analisis statistik meliputi Uji - t, Uji - F dan Koefisien determinasi (R^2) yang sebelumnya terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik sebagai berikut :

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik :

Uji penyimpangan asumsi klasik diperlukan untuk memperoleh keyakinan bahwa model yang ditaksir memenuhi syarat tidak bias linear terbaik (*BLUE*) (Gujarati, 1995). Untuk itu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik, yaitu : uji multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi.

Secara rinci prosedur uji penyimpangan asumsi klasik yang digunakan adalah sebagai berikut :

1) Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah terjadinya hubungan linear diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jika terjadi multikolinearitas sempurna maka penaksir OLS tak tertentu dan varian atau kesalahan standarnya tak tertentu. Menurut Gujarati (1995), jika kolinearitas tajam tetapi tidak sempurna maka konsekuensinya adalah :

- a) Meskipun penaksir OLS mungkin bisa diperoleh, kesalahan standarnya cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antara peningkatan variabel.
- b) Karena besarnya kesalahan standar, selang keyakinan untuk parameter populasi yang relevan cenderung lebih besar.

Untuk mendeteksi terjadinya multikolinearitas menurut Gujarati (1995), dapat dideteksi dari gejala sebagai berikut :

- 1) Bila nilai R^2 tinggi, tetapi hanya ada beberapa (sedikit) variabel bebas yang signifikan.
- 2) Zero-order correlation matrix dari variabel independen.
- 3) Cara regresi parsial antar variabel bebas, dimana bila nilai R^2 regresi parsial masing-masing variabel bebas lebih besar dari nilai R^2 model utama maka terjadi multikolinear. Jika ternyata terjadi multikolinearitas maka akan dilakukan langkah-langkah perbaikan sesuai teori yang lazim digunakan.

2) Heteroskedastisitas

Varians tiap unsur disturbance μ_i tergantung pada nilai yang dipilih dari variabel yang menjelaskan, yaitu suatu angka konstan yang sama dengan σ^2 . Hal ini merupakan asumsi homoskedastisitas. Jika hal ini tidak dipenuhi disebut terjadi heteroskedastisitas. Jika terjadi heteroskedastik maka penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar.

Dalam penelitian ini untuk menguji adanya heteroscedasticity akan dilakukan melalui Uji Park (Gujarati, 1995:108). Uji ini terdapat 2 tahapan yaitu : pertama, melaksanakan regresi OLS dengan tidak memandang persoalan heteroskedastisitas dan didapatkan nilai e_i , kedua, melakukan regresi sebagai berikut :

$$\text{Ln } e_i^2 = \alpha + \beta \text{ Ln } X_i + v_i$$

Jika nilai β signifikan secara statistik, maka data terdapat heteroskedastisitas, jika tidak signifikan maka asumsi homoskedastisitas dapat diterima.

3) Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui terjadi atau tidaknya autokorelasi dalam gangguan. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (dalam data deretan waktu) dan dalam data cross-sectional. Jika terjadi auto korelasi maka sama dengan kasus heteroskedastisitas, yaitu penaksir OLS tetap tak bias dan konsisten tetapi penaksir tadi tidak lagi efisien baik dalam sampel kecil maupun besar. Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d Test (Gujarati, 1995 : 442), dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a) Melakukan regresi OLS dan didapatkan residual e_i .
- b) Menghitung nilai d melalui rumus :

$$d = \frac{\sum_{t=2}^{t=n} (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^{t=n} e_t^2}$$

- c) Mencari nilai kritis d_L dan d_U sesuai ukuran sampel dan banyaknya variabel.
- d) Jika $d_U < d < 4 - d_U$ maka tidak terjadi autokorelasi.
- e) Jika $d > d_L$ atau $d > 4 - d_L$, terjadi autokorelasi
- f) Jika $d_L \leq d \leq d_U$ atau $4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$, tidak meyakinkan dan perlu dicari alternatif alat analisis yang lain.

2. Uji - t :

Uji - t dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya variable independen secara parsial terhadap variable dependen.

Dalam penelitian ini sebagaimana dinyatakan dalam hipotesis maka variabel Laju Inflasi, Jumlah kendaraan bermotor, PDRB Perkapita dan Jumlah Wisatawan secara parsial apakah berpengaruh negatif terhadap variable dependen PAD
Selanjutnya Jumlah kendaraan bermotor apakah berpengaruh positif terhadap prasarana jalan.

Berikutnya adalah Tingkat sukubunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta; PDRB Perkapita dan prasarana jalan berpengaruh positif terhadap investasi, serta investasi swasta, prasarana jalan, jumlah wisatawan dan PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap bantuan pemerintah pusat.

Untuk menguji signifikansi variabel-variabel yang diamati dilakukan dengan membandingkan nilai t – hitung dengan nilai t – tabelnya, jika nilai t – hitung lebih besar maka variabel-variabel independen secara statistik signifikan mempengaruhi variabel-variabel dependennya.

3. Uji – F :

Uji – F, dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Jika diperoleh F – hitung lebih besar dari F – table maka variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen

4. Koefisien determinasi (R^2) :

Koefisien determinasi, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam ketiga persamaan model dapat menjelaskan variabel dependennya, jika nilai R^2 menunjukkan angka yang tinggi maka variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model.

3.3.4. Analisis Ekonomi

Setelah dilakukan analisis statistik, maka sesuai dengan tujuan penelitian diperlukan analisis secara ekonomi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi variabel dependen dalam persamaan penelitian.

Untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel tersebut dapat dilihat dari analisis ekonomi yang meliputi :

- a. Pengaruh Inflasi, Jumlah Wisatawan, Kendaraan Bermotor dan PDRB Perkapita terhadap PAD.
- b. Pengaruh Prasarana Jalan, Tingkat Suku Bunga, dan PDRB Perkapita terhadap Investasi swasta.
- c. Pengaruh Investasi terhadap Bantuan Pemerintah Pusat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Kondisi Geografis

Propinsi Jawa Tengah terletak antara $5^{\circ} 40'$ dan $8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $108^{\circ} 30'$ dan $111^{\circ} 30'$ Bujur Timur (termasuk pulau Karimunjawa). Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lautan Indonesia. Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Jawa Barat serta sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Jawa Timur.

Luas Jawa Tengah sebesar 32.547,46 km², meliputi 6 Kota dan 29 Kabupaten.

Kondisi topografi di Jawa Tengah sangat beragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan perbukitan dengan pegunungan yang landai hingga curam serta daerah pantai.

Jenis tanah yang terdapat di Propinsi Jawa Tengah, terdiri atas tanah :

- (1) Alluvial, yaitu tanah yang beragam sifatnya, yang biasanya dipergunakan untuk tanah pertanian utama dan permukiman.
- (2) Latosol, yaitu tanah yang agak asam sampai asam, umumnya merupakan lahan pertanian yang sangat baik.
- (3) Latosol dan andosol, yaitu jenis tanah netral sampai asam, biasanya digunakan sebagai lahan pertanian sayur-sayuran, perkebunan dan hutan.

- (4) Litusol, yaitu tanah yang beraneka sifat dan warnanya, biasanya merupakan lahan pertanian yang kurang baik atau padang rumput.
- (5) Regosol, yaitu tanah netral sampai asam, umumnya digunakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan.
- (6) Grumusol, yaitu tanah yang agak netral, biasanya digunakan untuk tabah pertanian dan perkebunan.
- (7) Mediteran merah kuning, yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dan umumnya digunbakan sebagai tanah saweah, tegal, kebun buah dan padang rumput.
- (8) Podsolik merah kuning, yaitu tanah asam yang berwarna kuning sampai merah, umumnya digunbakan sebagai lahan pertanian dan perkebunan, di samping sebagian masih berupa hutan dan padang ilalang.

Keanekaragaman jenis tanah seperti disebutkan di atas memungkinkan pemanfaatan lahan yang bervariasi sesuai sifat dan kekhasan lahan untuk kegunaan tertentu. Informasi tentang kondisis lahan yang berkaitan dengan pertanian, industri, kehutanan, perkebunan dan permukiman erat kaitannya dengan sumber pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

4.2. Penggunaan Lahan

Secara administratif Propinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2000 tercatat

sebesar 3,25 juta hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas pulau Jawa (1,70 persen dari luas Indonesia). Luas yang ada terdiri dari 988 ribu hektar (30,67 persen) bukanlah sawah. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya luas lahan sawah tahun 2000 menurun sebesar 0,43 persen. Sebaliknya luas bukan lahan sawah meningkat sebesar 0,19 persen. Adapun luas penggunaan lahan menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2000 sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Luas Penggunaan Lahan Menurut Kabupaten/Kota
Di Jawa Tengah Tahun 2000 (ha)

	Kabupaten/Kota	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Jumlah
1	Kab.Cilacap	63,097	150,754	213,851
2	Kab.Banyumas	33,022	99,737	132,759
3	Kab.Purbalingga	20,934	56,831	77,765
4	Kab.Banjarnegara	16,168	90,806	106,974
5	Kab.Kebumen	39,768	88,506	128,274
6	Kab.Purworejo	30,234	73,248	103,482
7	Kab.Wonosobo	18,404	80,064	98,468
8	Kab.Magelang	39,759	68,814	108,573
9	Kab.Boyolali	22,628	78,879	101,507
10	Kab.Klaten	33,670	31,886	65,556
11	Kab.Sukoharjo	21,132	25,534	46,666
12	Kab.Wonogiri	30,620	151,617	182,237
13	Kab.Karanganyar	23,121	54,099	77,220
14	Kab.Sragen	39,943	54,706	94,649
15	Kab.Grobogan	59,769	137,816	197,585
16	Kab.Blora	46,794	132,646	179,440
17	Kab.Rembang	29,116	72,294	101,410
18	Kab.Pati	58,504	90,616	149,120
19	Kab.Kudus	21,681	20,836	42,517
20	Kab.Jepara	26,434	73,982	100,416
21	Kab.Demak	50,839	38,904	89,743
22	Kab.Semarang	24,557	70,129	94,686
23	Kab.Temanggung	20,653	66,370	87,023
24	Kab.Kendal	27,735	72,492	100,227

	Kabupaten/Kota	Lahan Sawah	Bukan Lahan Sawah	Jumlah
25	Kab.Batang	22,537	56,358	78,895
26	Kab.Pekalonga	26,471	57,142	83,613
27	Kab.Pemalang	38,356	62,834	101,190
28	Kab.Tegal	40,923	47,047	87,970
29	Kab.Brebes	63,376	102,397	165,773
30	Kota Magelang	267	1,545	1,812
31	Kota Surakarta	126	4,277	4,403
32	Kota Salatiga	791	4,505	5,296
33	Kota Semarang	4,008	33,359	37,367
34	Kota Pekalongan	1,512	2,984	4,496
35	Kota Tegal	1,059	2,390	3,449
	JUMLAH	998,008	2,256,404	3,254,412

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001

4.3. Kependudukan

Jumlah penduduk Jawa Tengah berdasar Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada tahun 2000, tercatat sebesar 30,78 juta jiwa atau sekitar 15% dari jumlah penduduk Indonesia, dan menempati urutan ke tiga dari seluruh propinsi di Pulau Jawa. Jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan jumlah penduduk laki-laki, ditunjukkan oleh rasio jenis kelamin (rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan), sebesar 98%.

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 5 tahun (1996 – 2000) cenderung mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk, pada tahun 2000 tercatat sebesar 946 jiwa setiap kilometer persegi. Jumlah penduduk dan angkatan kerja Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2000 disajikan pada Tabel 4.2. sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Penduduk dan Angkatan Kerja Jawa Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2000 (orang)

	Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Angkatan Kerja
1	Kab.Cilacap	794,010	806,824	1,600,834	1,008,958
2	Kab.Banyumas	738,584	709,281	1,447,865	949,370
3	Kab.Purbalingga	381,240	401,474	782,714	506,840
4	Kab.Banjarnegara	423,938	407,389	831,327	555,793
5	Kab.Kebumen	577,885	583,037	1,160,922	706,319
6	Kab.Purworejo	358,270	345,421	703,691	445,311
7	Kab.Wonosobo	389,009	361,668	730,677	484,040
8	Kab.Magelang	541,931	550,845	1,092,776	718,390
9	Kab.Bojolan	431,277	460,086	891,363	588,434
10	Kab.Klaten	539,711	567,766	1,107,477	736,774
11	Kab.Sukoharjo	381,589	387,163	768,752	517,258
12	Kab.Wonogiri	482,723	483,548	966,271	642,193
13	Kab.Karanganyar	379,235	375,567	754,802	513,168
14	Kab.Sragen	417,075	425,684	842,759	561,269
15	Kab.Grobogan	614,312	643,646	1,257,958	819,532
16	Kab.Blora	409,663	398,780	808,443	545,291
17	Kab.Rembang	273,140	281,550	554,690	351,058
18	Kab.Pati	554,019	590,281	1,144,300	785,330
19	Kab.Kudus	350,985	350,552	701,537	491,034
20	Kab.Jepara	488,602	474,307	962,909	643,635
21	Kab.Demak	483,049	482,450	965,499	616,908
22	Kab.Semarang	411,878	416,291	828,169	539,575
23	Kab.Temanggung	331,252	328,629	659,881	447,306
24	Kab.Kendal	410,419	434,951	845,370	552,442
25	Kab.Batang	318,245	340,076	658,321	427,331
26	Kab.Pekalonga	395,296	399,748	795,044	495,867
27	Kab.Pemalang	621,792	631,914	1,253,706	794,132
28	Kab.Tegal	684,796	689,586	1,374,382	873,860
29	Kab.Brebes	836,446	852,565	1,689,011	1,079,109
30	Kota Magelang	56,724	59,521	116,245	81,338
31	Kota Surakarta	237,709	251,659	489,368	337,988
32	Kota Salatiga	74,396	75,805	150,201	107,836
33	Kota Semarang	638,207	703,523	1,341,730	950,464
34	Kota Pekalongan	126,176	134,638	260,814	170,557
35	Kota Tegal	119,855	116,183	236,038	157,536
	JUMLAH	15,253,438	15,522,408	30,775,846	20,182,246

Sumber : BPS Prop.Jateng, Jawa Tengah Dalam Angka, 2001

4.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Melalui data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah. Adapun PDRB

Jawa Tengah atas dasar harga konstan 1993 disajikan dalam Tabel 4.3 di bawah ini :

Tabel 4.3.
Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) Propinsi
Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000
(Atas Dasar Harga Konstan 1993)

Tahun	PDRB (Juta Rp)	Perkembangan (%)
1996	41.862.203,72	123,20
1997	43.129.838,90	126,93
1998	38.065.273,35	112,03
1999	39.394.513,74	115,94
2000	40.932.538,47	120,46

Sumber : Bappeda Prop.Jateng, 2001

Dari Tabel 4.3. dapat diketahui bahwa PDRB Jawa Tengah pada tahun 2000 atas dasar harga konstan 1993 sebesar Rp 40.932,54 Milyar, sehingga sejak tahun 1993 telah mengalami kenaikan sebesar 1,20 kali..

4.5.Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun (1996 – 2000) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.4.
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 1996 - 2000

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1996	7,30
1997	3,03
1998	-11,74
1999	3,49
2000	3,90

Sumber : Bappeda Prop.Jateng, 2001

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pada tahun 1996 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif tinggi yaitu sebesar 7,30%, kemudian setelah itu menurun menjadi 3,03% pada tahun berikutnya. Pada tahun 1998 menurun tajam dan mengalami pertumbuhan negatif 11,74%, hal ini sebagai dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Kemudian berangsur-angsur pulih dan kembali mengalami pertumbuhan positif pada tahun 1999 dan tahun 2000.

4.6. Pertumbuhan Sektor Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sektoral di Jawa Tengah selama kurun waktu 6 tahun, yaitu sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.5. sebagai berikut :

Tabel 4.5.
Pertumbuhan Sektor Ekonomi Jawa Tengah
Tahun 1996 - 2000

No.	Sektor	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	3,37	-3,20	-3,35	3,07	3,21
2.	Pertambangan dan Penggalian	11,85	11,35	-7,11	5,49	2,49
3.	Industri Pengolahan	8,71	2,87	-14,61	2,82	3,19
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	14,03	13,47	3,64	10,38	9,66
5.	Bangunan	11,24	6,37	-32,10	11,93	1,49
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,35	6,40	-9,00	3,20	6,70
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	12,88	3,61	-0,09	10,29	5,45
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,11	7,99	-34,20	3,77	2,99
9.	Jasa-jasa	4,13	2,64	-9,60	-0,20	1,27
	PDRB TOTAL	7,30	3,03	-11,74	3,49	3,90

Sumber : Bappeda Prop.Jateng, 2001

Pada Tabel 4.5. terlihat bahwa laju pertumbuhan seluruh sektor pada tahun 2000 menunjukkan pertumbuhan positif. Tahun 1998, di mana pada tahun tersebut terjadi puncak krisis ekonomi hampir semua sektor mengalami pertumbuhan negatif. Pada tahun 1999 terlihat perekonomian mulai membaik di mana seluruh sektor ekonomi berhasil bangkit dengan laju pertumbuhan positif kecuali sektor jasa-jasa, sedangkan tahun 2000 seluruh sektor ekonomi sudah mengalami pertumbuhan positif.

Sektor listrik, gas dan air bersih mengalami pertumbuhan yang paling besar dibandingkan sektor ekonomi lainnya, yaitu sebesar 9,66%. Sektor

yang mengalami pertumbuhan paling rendah adalah sektor jasa-jasa sebesar 1,27%.

4.7. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi merupakan gambaran besarnya kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap total PDRB. Selama kurun waktu 5 tahun, yaitu tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 struktur ekonomi Jawa Tengah seperti terlihat pada Tabel 4.6. sebagai berikut :

Tabel 4.6.
Struktur Ekonomi Jawa Tengah Tahun 1996 – 2000
Atas Dasar Harga Konstan 1993 (%)

No.	Sektor	1996	1997	1998	1999	2000
1.	Pertanian	20,27	19,05	20,86	20,78	20,64
2.	Pertambangan dan Penggalian	1,26	1,36	1,43	1,46	1,44
3.	Industri Pengolahan	31,84	31,79	30,76	30,55	30,35
4.	Listrik, Gas dan Air Minum	0,83	0,91	1,07	1,14	1,21
5.	Bangunan	4,81	4,96	3,82	4,13	4,03
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	21,58	22,29	22,98	22,91	23,53
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	4,07	4,10	4,64	4,94	5,02
8.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	5,05	5,29	3,95	3,96	3,92
9.	Jasa-jasa	10,29	10,25	10,50	10,12	9,87
	J U M L A H	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Bappeda Prop.Jateng, 2001

Dari tabel 4.6. menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2000 industri pengolahan masih merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar terhadap pembentukan PDRB Jawa tengah, yaitu sebesar 30,35%.

Sektor lain yang memberikan sumbangan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 23,53% dan sektor pertanian sebesar 20,64%. Kemudian sektor yang memberikan kontribusi terkecil adalah terhadap pembentukan PDRB Propinsi Jawa Tengah adalah sektor listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 1,21%. Secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir belum terjadi pergeseran struktur ekonomi yang berarti di mana masing-masing sektor posisinya masih tetap.

4.8. Pendapatan Perkapita

Dengan melihat pendapatan perkapita atas dasar harga konstan dapat diperoleh gambaran tingkat kemakmuran serta pertumbuhan tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai. Adapun pendapatan perkapita Jawa Tengah atas dasar harga konstan 1993 tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.7. sebagai berikut :

Tabel 4.7.
Rata-rata Pendapatan Perkapita Penduduk Jawa Tengah
Tahun 1996 - 2000
Atas Dasar Harga Konstan 1993

Tahun	Pendapatan Perkapita (Rp)	Pertumbuhan (%)
1996	1.215,832,66	6,60
1997	1.226.211,35	0,85
1998	1.073.830,96	-12,43
1999	1.096.477,26	2,11
2000	1.122.089,54	2,34

Sumber : Bappeda Prop.Jateng, 2001

Dengan melihat Tabel 4.7. dapat diperoleh gambaran bahwa pendapatan perkapita atas dasar harga konstan 1993, pertumbuhannya dalam periode 1996 – 2000 mengalami penurunan sebesar minus 7,71%. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa pertumbuhan yang terjadi belum mampu mengangkat tingkat kemakmuran masyarakat seperti yang terjadi pada tahun 1996.

4.9. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Data Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.8. sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1979/1980 s/d 2000

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Jutaan Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1979/1980	21,133.24	
1980/1981	23,800.15	12.62
1981/1982	28,837.84	21.17
1982/1983	33,725.45	16.95
1983/1984	24,070.93	(28.63)
1984/1985	31,890.46	32.49
1985/1986	42,671.28	33.81
1986/1987	51,391.41	20.44
1987/1988	58,099.04	13.05
1988/1989	65,571.00	12.86
1989/1990	78,598.00	19.87
1990/1991	100,156.00	27.43
1991/1992	107,332.00	7.16
1992/1993	120,583.00	12.35

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Jutaan Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1993/1994	150,121.00	24.50
1994/1995	210,220.00	40.03
1995/1996	279,841.00	33.12
1996/1997	331,160.00	18.34
1997/1998	364,772.00	10.15
1998/1999	244,542.00	(32.96)
1999/2000	318,566.00	30.27
2000	505,660.00	58.73
Rata-rata	145,124.63	18.27

Sumber : Dipenda Propinsi Jawa Tengah, 2002

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Dari Tabel 4.8. dapat diketahui bahwa selama kurun waktu tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan 2000 PAD Propinsi Jawa tengah rata-rata sebesar Rp 145.124,63 juta dengan kenaikan rata-rata per athun sebesar 18,27%. Dilihat dari pertumbuhannya pada tahun anggaran 1983/1984 mengalami pertumbuhan negatif sebesar 28,63% dan pada tahun 1998/1999 negatif 32,96%. Hal ini kemungkinan terjadi akibat krisis ekonomi pada tahun tersebut.

4.10. Investasi Swasta

Data Investasi Swasta. Baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) di Propinsi Jawa Tengah tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.9. sebagai berikut :

Tabel 4.9.
Investasi Swasta di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1980 s/d 2000

Tahun	Nilai Investasi Swasta (Jutaan Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1980	165,028.67	
1981	193,292.30	17.13
1982	433,156.25	124.09
1983	2,160,962.41	398.89
1984	612,204.70	(71.67)
1985	704,678.40	15.11
1986	848,629.90	20.43
1987	909,127.20	7.13
1988	1,164,173.30	28.05
1989	789,500.00	(32.18)
1990	5,799,280.94	634.55
1991	4,349,499.00	(25.00)
1992	1,734,429.00	(60.12)
1993	3,074,523.00	77.26
1994	3,243,931.00	5.51
1995	2,048,944.00	(36.84)
1996	1,901,448.00	(7.20)
1997	7,406,630.81	289.53
1998	2,482,396.43	(66.48)
1999	1,038,689.12	(58.16)
2000	2,451,203.42	135.99
Rata-rata	2,071,987.04	69.80

Sumber : Badan Penanaman Modal Propinsi Jawa Tengah, 2002

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Sesuai data dalam tabel 4.9. dapat diketahui bahwa investasi rata-rata antara tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 sebesar Rp 2.071.987,04 juta dengan pertumbuhan rata-rata 69,80% per tahun. Namun demikian secara tahunan baik dari nilai investasi maupun pertumbuhannya sangat fluktuatif.

4.11. Pengeluaran Pemerintah untuk Perbaikan/Pembuatan

Jalan

Besarnya nilai pengeluaran pemerintah untuk perbaikan dan pembuatan jalan selama tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.10. sebagai berikut :

Tabel 4.10.
Pengeluaran Pemerintah untuk Perbaikan/Pembuatan Jalan
Tahun 1979/1980 s/d 2000

Tahun Anggaran	Pengeluaran Pemerintah (Jutaan Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1979/1980	10,156,423.49	
1980/1981	10,915,113.50	7.47
1981/1982	12,347,413.47	13.12
1982/1983	13,688,928.46	10.86
1983/1984	14,993,349.91	9.53
1984/1985	17,115,696.25	14.16
1985/1986	20,136,113.24	17.65
1986/1987	22,498,450.55	11.73
1987/1988	24,191,882.32	7.53
1988/1989	26,584,486.07	9.89
1989/1990	30,556,880.55	14.94
1990/1991	39,921,800.80	30.65
1991/1992	41,345,425.00	3.57
1992/1993	41,701,750.00	0.86
1993/1994	32,297,427.39	(22.55)
1994/1995	30,492,238.99	(5.59)
1995/1996	33,958,547.75	11.37
1996/1997	40,608,783.24	19.58
1997/1998	52,445,816.57	29.15
1998/1999	41,161,374.74	(21.52)
1999/2000	35,810,441.02	(13.00)
2000	84,432,440.09	135.78
Rata-rata	30,789,126.52	13.58

Sumber : Dinas PU Bina Marga Propinsi Jawa Tengah, 2002
Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Data yang disajikan dalam Tabel 4.10. menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah guna perbaikan/pembuatan prasarana jalan di Propinsi Jawa Tengah rata-rata sebesar Rp 30.789.126,52 juta per tahun dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 13,58%. Jika dilihat secara parsial per tahun cukup fluktuatif.

4.12. Bantuan Pemerintah Pusat

Sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah salah satunya bersumber dari bantuan pemerintah pusat. Besarnya bantuan pemerintah pusat yang dialokasikan di Propinsi Jawa Tengah selama tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.11. sebagai berikut :

Tabel 4.11.
Alokasi Dana Bantuan Pemerintah Pusat di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1979/1980 s/d 2000

Tahun Anggaran	Bantuan Pemerintah Pusat (Jutaan Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1979/1980	162,523.37	
1980/1981	173,732.26	6.90
1981/1982	189,882.03	9.30
1982/1983	218,445.03	15.04
1983/1984	251,939.10	15.33
1984/1985	268,088.87	6.41
1985/1986	315,114.77	17.54
1986/1987	437,504.03	38.84
1987/1988	472,998.10	8.11
1988/1989	520,024.00	9.94
1989/1990	402,412.00	(22.62)
1990/1991	510,500.00	26.86
1991/1992	605,159.00	18.54
1992/1993	666,641.00	10.16
1993/1994	511,735.00	(23.24)

Tahun Anggaran	Bantuan Pemerintah Pusat (Jutaan Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1994/1995	461,068.00	(9.90)
1995/1996	471,070.00	2.17
1996/1997	500,581.00	6.26
1997/1998	557,083.00	11.29
1998/1999	439,471.00	(21.11)
1999/2000	538,936.00	22.63
2000	454,022.00	(15.76)
Rata-rata	414,951.34	6.32

Sumber : Biro Keuangan Setda Propinsi Jawa Tengah, 2002
 Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Dari Tabel 4.11 dapat diketahui bahwa alokasi dana bantuan pemerintah pusat rata-rata antara tahun anggaran 1979/1980 sampai dengan tahun 2000 sebesar Rp 414.951,34 juta dengan rata-rata pertumbuhan selama kurun waktu tersebut sebesar 6,32%. Secara tahunan besarnya sangat bervariasi.

4.13. Laju Inflasi

Laju inflasi di Jawa Tengah dengan mengambil laju inflasi rata-rata yang terjadi di Kota Semarang, Tegal dan Purwokerto dapat dilihat pada Tabel 4.12. sebagai berikut :

Tabel 4.12.
Laju Inflasi di Propinsi Jawa Tengah
Tahun 1980 s/d 2000

Tahun	Laju Inflasi (%)	Tahun	Laju Inflasi (%)
1980	19.30	1991	9.76
1981	5.43	1992	10.18
1982	13.21	1993	9.09
1983	9.49	1994	5.72
1984	5.79	1995	10.41
1985	4.49	1996	5.70
1986	3.73	1997	4.39
1987	9.59	1998	27.37
1988	5.30	1999	45.46
1989	4.83	2000	1.75
1990	9.02	Rata-rata	10.48

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, 2002

Dari Tabel 4.12 diperoleh gambaran bahwa laju inflasi rata-rata selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2000 sebesar 10,48% per tahun.

Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 1997 dan 1998 masing-masing 4,39% dan 27,37%. Hal ini kemungkinan terjadi akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun tersebut.

4.14. Pendapatan Perkapita Tahun 1980 - 2000

Pendapatan perkapita masyarakat menggambarkan tingkat kemakmuran suatu masyarakat. Pada umumnya pendapatan perkapita dilihat dari besarnya PDRB perkapita seperti dapat dilihat pada Tabel 4.13. sebagai berikut :

Tabel 4.13.
Pendapatan Regional Domestik Brutto (PDRB) Perkapita
Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000

Tahun	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Rp)	Pertumbuhan*) (%)
1980	69,086.54	
1981	79,547.09	15.14
1982	82,042.40	3.14
1983	248,498.22	202.89
1984	258,178.70	3.90
1985	276,919.14	7.26
1986	293,631.49	6.04
1987	317,271.99	8.05
1988	334,356.99	5.38
1989	147,768.44	(55.81)
1990	367,409.16	148.64
1991	392,499.31	6.83
1992	445,987.65	13.63
1993	1,004,820.19	125.30
1994	1,064,542.98	5.94
1995	1,140,536.46	7.14
1996	1,215,832.66	6.60
1997	1,226,211.35	0.85
1998	1,073,830.96	(12.43)
1999	1,096,477.26	2.11
2000	1,122,089.54	2.34
Rata-rata	583,692.31	25.15

Sumber : BPS Propinsi Jawa Tengah, 2002
 Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Berdasarkan Tabel 4.13 diperoleh gambaran bahwa PDRB Perkapita rata-rata selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2000 sebesar Rp 583.692,31 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 25,15%. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 1989 dan tahun 1998.

4.15. Jumlah Kendaraan

Jumlah kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 atau lebih mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 yang terdaftar di Propinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.14. sebagai berikut :

Tabel 4.14.
Jumlah Kendaraan Bermotor Roda 2 dan Roda 4 atau Lebih
Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (bh)	Pertumbuhan*) (%)
1980	715,026.00	
1981	809,279.00	13.18
1982	869,096.00	7.39
1983	909,246.00	4.62
1984	915,043.00	0.64
1985	1,047,955.00	14.53
1986	1,062,296.00	1.37
1987	1,098,154.00	3.38
1988	1,161,536.00	5.77
1989	1,294,953.00	11.49
1990	1,583,748.00	22.30
1991	1,859,989.00	17.44
1992	2,091,204.00	12.43
1993	2,271,097.00	8.60
1994	2,374,573.00	4.56
1995	2,434,045.00	2.50
1996	2,499,216.00	2.68
1997	2,651,247.00	6.08
1998	2,625,250.00	(0.98)
1999	2,800,220.00	6.66
2000	3,090,320.00	10.36
Rata-rata	1,722,071.10	7.75

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Jawa Tengah, 2002
 Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui bahwa jumlah kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 atau lebih rata-rata selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2000 sejumlah 1.722.071 buah dengan rata-rata pertumbuhan per tahun selama kurun waktu tersebut 7,75%. Pertumbuhan negatif terjadi pada tahun 1998 yaitu sebesar -0,98%. Menurut Dipenda (2002), hal ini terjadi akibat krisis ekonomi pada tahun tersebut mengakibatkan kecilnya angka pembelian kendaraan baru dan tingginya jumlah kendaraan yang mutasi ke luar daerah.

4.16. Jumlah Wisatawan

Jumlah wisatawan yang menginap di hotel berbintang maupun melati di Jawa Tengah tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.15. sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Jumlah Wisatawan Yang Menginap di Hotel Berbintang dan Melati di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000

Tahun	Jumlah Wisatawan Yang Menginap (orang)	Pertumbuhan*) (%)
1980	5,236,410.00	
1981	6,153,979.00	17.52
1982	5,590,793.00	(9.15)
1983	8,134,450.00	45.50
1984	7,716,881.00	(5.13)
1985	8,412,853.00	9.02
1986	7,362,037.00	(12.49)
1987	9,203,281.00	25.01
1988	8,635,449.00	(6.17)
1989	10,266,963.00	18.89
1990	11,335,598.00	10.41
1991	10,922,600.00	(3.64)
1992	10,980,970.00	0.53
1993	12,034,538.00	9.59
1994	12,477,126.00	3.68
1995	14,381,614.00	15.26
1996	14,701,777.00	2.23
1997	14,466,188.00	(1.60)
1998	11,673,927.00	(19.30)
1999	14,840,684.00	27.13
2000	16,764,701.00	12.96
Rata-rata	10,537,753.29	7.01

Sumber : Dinas Pariwisata Propinsi Jawa Tengah, 2002

Keterangan : *) angka dalam kurung berarti negatif

Data dalam Tabel 4.15 menunjukkan bahwa jumlah wisatawan yang menginap di hotel berbintang dan melati di Propinsi Jawa tengah selama kurun waktu 1980 sampai dengan 2000 rata-rata per tahun sejumlah 10.537.753 orang dengan rata-rata pertumbuhan per tahun selama kurun waktu tersebut sebesar 7,01%. Adapun pertumbuhan per tahun menunjukkan sangat fluktuatif.

4.17. Tingkat Suku Bunga

Tingkat suku bunga deposito bank pemerintah di Jawa Tengah tahun 1980 sampai dengan tahun 2000 dapat dilihat pada Tabel 4.16. sebagai berikut :

Tabel 4.16.
Tingkat Suku Bunga Deposito Bank Pemerintah
di Propinsi Jawa Tengah Tahun 1980 s/d 2000

Tahun	Suku Bunga Deposito (%)	Tahun	Suku Bunga Deposito (%)
1980	12.81	1991	15.32
1981	12.91	1992	12.09
1982	16.31	1993	8.72
1983	17.26	1994	9.87
1984	12.90	1995	13.62
1985	19.30	1996	14.13
1986	9.95	1997	30.52
1987	13.79	1998	37.84
1988	14.86	1999	23.70
1989	12.40	2000	12.34
1990	14.94	Rata-rata	15.98

Sumber : Bank Indonesia, 2002

Data dalam Tabel 4.16 menunjukkan bahwa tingkat suku bunga deposito Bank Pemerintah di Propinsi Jawa tengah selama kurun waktu

1980 sampai dengan 2000 rata-rata per tahun sebesar 15,98%. Adapun tingkat suku bunga tertinggi terjadi pada tahun 1997 dan 1998 masing-masing sebesar 30,52 dan 37,84%.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan dalam studi ini, yaitu untuk menganalisis sejumlah variabel yang diduga mempengaruhi pendapatan asli daerah dan bantuan pemerintah pusat di Jawa Tengah, dipakai alat analisis regresi. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan rentang waktu selama 21 tahun mulai tahun 1980 sampai dengan tahun 2000. Estimasi dilakukan dengan bantuan paket program SPSS Versi 10.

5.1. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diestimasi dengan model sebagai berikut :

$$PAD_t = a_0 + a_1 IF_t + a_2 W_t + a_3 KG_t + a_4 PDRBP_t + U_t \dots\dots (5.1)$$

di mana :

PAD = pendapatan asli daerah

IF = laju inflasi

W = jumlah wisatawan

KG = jumlah kendaraan

PDRBP = PDRB perkapita

Hasil estimasi dengan model tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel 5.1.
Ringkasan Hasil Estimasi Model PAD

Dependen Variabel : PAD

Variabel	Koefisien regresi	t-hitung	Probabilitas-Signifikansi	Keputusan	Pembuktian Hipotesis
Indep.Var.:					
IF	-1346,996	-0,771	0,452	Tidak signifikan	tidak terbukti
W	0,03597	1,858	0,081*	Signifikan	terbukti
KG	0,176	9,120	0,000***	Signifikan	terbukti
PDRBP	0,158	2,468	0,030**	Signifikan	terbukti
Constant	-171719	-2,140	0,048		
R ² : 0,830 F-hitung : 19,530 Prob.Sig. : 0,000*** DW : 1,822 N : 21 Σ Var.Indep Signifikan : 3 dari 4					

Keterangan : *) signifikan pada taraf alpha 10%

**) signifikan pada taraf alpha 5%

***) signifikan pada taraf alpha 1%

5.1.1. Analisis Statistik

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis terhadap hasil estimasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik dengan hasil sebagai berikut :

a) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas dilihat melalui matriks korelasi sebagai berikut :

Tabel 5.2.
Matriks Koefisien Korelasi Model PAD

Variabel Independen	IF	W	KG	PDRBP
IF	1,000	0,378	-0,389	0,069
W		1,000	-0,432	-0,050
KG			1,000	-0,491
PDRBP				1,000

Berdasarkan tabel matriks koefisien korelasi tersebut di atas diketahui bahwa koefisien korelasi diantara variabel bebas kurang dari 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji adanya heteroscedasticity dilakukan melalui Uji Park (Gujarati, 1995:108), dengan bantuan paket program Eviews hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5.3.
Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Model PAD
Dengan Uji Park

Dependen Variabel : LRES²

Variabel	Koefisien regresi	t-hitung	Probabilitas-Signifikansi	Keputusan
Indep.Var.:				
LIF	-1,009	-1,835	0,452	Tidak signifikan
LW	0,036	1,858	0,185	Tidak Signifikan
LKG	1,795	0,659	0,519	Tidak Signifikan
LPDRBP	0,310	0,289	0,776	Tidak Signifikan
Constant	92.674	2.530	0,122	

Keterangan : signifikan apabila $p\text{-value} \leq 0,10$

Berdasarkan hasil uji Park tersebut menunjukkan bahwa dari nilai probabilitasnya tidak ada variabel yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

c) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d Test (Gujarati, 1995 : 442). Dari hasil estimasi pada Tabel 5.1. diperoleh nilai DW hitung sebesar 1,822. Nilai DW tabel :

$dL = 0,93$ $dU = 1,81$ ($n = 21$, variabel bebas 4). Jadi $1,81 < 1,822 < 4 - 1,81$ (2,19). Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji - t

Uji - t dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dari hasil estimasi (lihat Tabel 5.1) menunjukkan bahwa variabel PDRBP signifikan pada alpha 5% ($p\text{-value} = 0,030$); KG signifikan pada taraf alpha 1% ($p\text{-value} = 0,000$); W signifikan pada taraf alpha 10% ($p\text{-value} = 0,081$). Sedangkan variabel IF tidak signifikan ($p\text{-value} = 0,452$). Adapun pengujian tanda menunjukkan bahwa variabel yang signifikan bertanda positif sesuai teori, sedang untuk variabel IF walaupun tidak signifikan tandanya negatif sesuai dengan teori.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa PDRB perkapita, jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD) terbukti. Sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa laju inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD tidak terbukti.

3. Uji - F

Uji-F dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil estimasi Tabel 5.1. menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 19,530 signifikan pada taraf alpha 1% ($p\text{-value} = 0,000$). Dengan demikian maka variabel IF, PDRBP, KG dan W secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu PAD.

4. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil estimasi (lihat Tabel 5.1) dapat diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,830$, artinya 83% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 17% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

5.1.2. Analisis Ekonomi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah wisatawan, jumlah kendaraan bermotor dan PDRB perkapita berpengaruh terhadap PAD. Secara ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Variabel jumlah wisatawan (W) dengan koefisien regresi sebesar 0,03597 dan bertanda positif, dapat diartikan bahwa dengan peningkatan jumlah wisatawan di Propinsi Jawa Tengah sebesar 1000 orang, akan meningkatkan penerimaan PAD sebesar Rp 35,97 juta, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan.
- 2) Variabel KG dengan koefisien regresi sebesar 0,176 dan bertanda positif, dapat diinterpretasikan bahwa setiap kenaikan jumlah kendaraan di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 1000 unit akan menyebabkan peningkatan PAD sebesar Rp 176 juta, dengan asumsi faktor lain konstan.

- 3) Variabel PDRBP dengan koefisien regresi sebesar 0,158 dengan tanda positif, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan PDRB perkapita sebesar Rp 1000,- akan menyebabkan peningkatan PAD sebesar Rp 158 juta dengan asumsi faktor-faktor lain konstan.
- 4) Variabel laju inflasi (IF), ternyata tidak terbukti berpengaruh terhadap PAD.

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu Hinrichs (1965), Alfian Lains (1985), Musgrave (1989), Wantara (1997), Jaka Sriyana (1999) dan Widhihastuti (2000).

5.2. Analisis Investasi Swasta

Investasi swasta dapat diestimasi dengan model sebagai berikut :

$$I_t = b_0 + b_1 J_t + b_2 RR_t + b_3 PDRBP_t + U_2 \dots\dots\dots (5.2)$$

di mana :

I = investasi swasta

J = prasarana jalan

RR = tingkat suku bunga

PDRBP = PDRB perkapita

Hasil estimasi dengan model tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel 5.4.
Ringkasan Hasil Estimasi Model Investasi Swasta (I)

Dependen Variabel : I

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas-Signifikansi	Keputusan	Pembuktian Hipotesis
Indep.Var.:					
J	0,04462	2,159	0,045**	Signifikan	terbukti
RR	-0,00669	-1,769	0,096*	Signifikan	terbukti
PDRBP	0,153	2,928	0,012***	Signifikan	terbukti
Constant	-308464	-0,285	0,079		
R ² : 0,814					
F-hitung : 2,596 Prob.Sig. : 0,086*					
DW : 1,675					
N : 21					
Σ Var.Indep Signifikan : 3 dari 3					

Keterangan : *) signifikan pada taraf alpha 10%

**) signifikan pada taraf alpha 5%

***) signifikan pada taraf alpha 1%

5.2.1. Analisis Statistik

1. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis terhadap hasil estimasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan uji penyimpangan asumsi klasik dengan hasil sebagai berikut :

a) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui terjadinya multikolinearitas dilihat melalui matriks korelasi sebagai berikut :

Tabel 5.5.
Matriks Koefisien Korelasi Model Investasi Swasta (I)

Variabel Independen	J	RR	PDRBP
J	1,000	0,071	-0,451
RR		1,000	-0,306
PDRBP			1,000

UPT-PUSTAK-UNDIP

Berdasarkan tabel matriks koefisien korelasi tersebut di atas diketahui bahwa koefisien korelasi diantara variabel bebas kurang dari 0,50 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut bebas multikolinearitas.

b) Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji adanya heteroscedasticity dilakukan melalui Uji Park (Gujarati, 1995:108), dengan bantuan paket program Eviews hasilnya sebagai berikut :

Tabel 5.6.
Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Investasi Swasta (I) Dengan Uji Park

Dependen Variabel : LRES²

Variabel	Koefisien regresi	t-hitung	Probabilitas-Signifikansi	Keputusan
Indep.Var.:				
LJ	3,584	1,711	0,119	Tidak signifikan
LRR	-2,026	-1,086	0,293	Tidak Signifikan
LPDRBP	-1,293	-1,090	0,291	Tidak Signifikan
Constant	-19,467	-0,771	0,451	

Keterangan : signifikan apabila $p\text{-value} \leq 0,10$

Berdasarkan hasil uji Park tersebut menunjukkan bahwa dari nilai probabilitasnya tidak ada variabel yang signifikan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model empiris yang digunakan tidak terdapat heteroskedastisitas.

c) Uji Autokorelasi

Untuk mendeteksi terjadinya autokorelasi dilakukan melalui Durbin Watson d Test (Gujarati, 1995 : 442). Dari hasil estimasi pada Tabel 5.4. diperoleh nilai DW hitung sebesar 1,675. Nilai DW tabel :

$dL = 1,03$ $dU = 1,67$ ($n = 21$, variabel bebas 3). Jadi $1,67 < 1,675 < 4 - 1,03$ (2,97). Dengan demikian tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji - t

Uji - t dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dari hasil estimasi (lihat Tabel 5.4) menunjukkan bahwa variabel J signifikan pada alpha 5% ($p\text{-value} = 0,045$); PDRBP signifikan pada taraf alpha 1% ($p\text{-value} = 0,012$); dan variabel RR signifikan pada taraf alpha 10% ($p\text{-value} = 0,096$). Adapun pengujian tanda menunjukkan bahwa variabel J dan PDRBP bertanda positif, sedangkan RR bertanda negatif. Sehingga hasil pengujian tanda menunjukkan bahwa sesuai dengan teori.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa prasarana jalan (J) dan PDRB perkapita (PDRBP) berpengaruh positif terhadap Investasi Swasta (I) terbukti. Demikian pula hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat suku bunga (RR) berpengaruh negatif terhadap investasi swasta (I) juga terbukti.

3. Uji - F

Uji-F dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil estimasi Tabel 5.4. menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 2,596 signifikan pada taraf alpha 10% ($p\text{-value} = 0,086$). Dengan demikian maka variabel J, PDRBP dan RR secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu I.

4. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil estimasi (lihat Tabel 5.4) dapat diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,814$, artinya 81,4% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 18,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

5.2.2. Analisis Ekonomi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa prasarana jalan (J), PDRB perkapita (PDRBP), dan tingkat suku bunga (RR) berpengaruh terhadap investasi swasta (I). Secara ekonomi dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Variabel prasarana jalan (J) dengan koefisien regresi sebesar 0,04462 dan bertanda positif, dapat diartikan bahwa setiap peningkatan biaya perbaikan/pembuatan prasarana jalan sebesar Rp 1 juta akan menyebabkan peningkatan investasi swasta sebesar Rp 0,045 juta dengan asumsi faktor-faktor lain konstan.
- 2) Variabel PDRBP dengan koefisien regresi sebesar 0,153 dan bertanda positif, dapat diinterpretasikan bahwa setiap peningkatan pendapatan perkapita di Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1000,- akan menyebabkan peningkatan investasi swasta sebesar Rp 153 juta, dengan asumsi faktor lain konstan.

- 3) Variabel tingkat suku bunga (RR) dengan koefisien regresi sebesar $-0,00669$ dengan tanda negatif, dapat diartikan bahwa dengan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 1%, akan menurunkan investasi sebesar Rp 0,0067 juta, dengan asumsi faktor-faktor lain konstan.

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu, yaitu Wantara (1997), dan Widhihastuti (2000), hanya variabel tingkat suku bunga pada penelitiannya Wantara (1997) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap investasi swasta, dalam penelitian ini terbukti berpengaruh negatif terhadap investasi walaupun besarnya pengaruh relatif kecil.

5.3. Analisis Bantuan Pemerintah Pusat

Untuk menganalisis variabel bantuan pemerintah pusat (BP) digunakan teknik estimasi 2-SLS adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap I : Mengestimasi persamaan (5.2) dengan OLS, setelah diperoleh hasil estimasi maka dependen variabel (I) kemudian diprediksi (\hat{I}). Tahap ini telah dilakukan dalam analisis investasi pada sub bab 5.2. Dalam estimasi persamaan (5.2) dapat diketahui nilai prediksi variabel investasi, yang untuk selanjutnya diberi notasi atau lambang \hat{I} .
- 2) Tahap II : Mengestimasi $BP = f(\hat{I})$ (persamaan 3.3) dengan teknik OLS. Adapun model yang diestimasi sebagai berikut :

$$BP_t = d_0 + d_1 \hat{I}_t + U_t \dots\dots\dots (5.3)$$

di mana :

BP = bantuan pemerintah pusat

\hat{I} = investasi swasta

Hasil estimasi dengan model tersebut di atas ditunjukkan dalam Tabel

5.7. sebagai berikut :

Tabel 5.7.
Ringkasan Hasil Estimasi Model Bantuan Pemerintah Pusat (BP)

Dependen Variabel : BP

Variabel	Koefisien Regresi	t-hitung	Probabilitas-Signifikansi	Keputusan	Pembuktian Hipotesis
Indep.Var.: \hat{I}	544,821	2,355	0,029**	Signifikan	terbukti
Constant	562014,5	8,911	0,000		
R ² : 0,226					
F-hitung : 5,546 Prob.Sig. : 0,029***					
DW : 1,438					
N : 21					
Σ Var.Indep Signifikan : 1 dari 1					

Keterangan : *) signifikan pada taraf alpha 10%

**) signifikan pada taraf alpha 5%

***) signifikan pada taraf alpha 1%

5.3.1. Analisis Statistik

1. Uji - t

Uji - t dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Dari hasil estimasi (lihat Tabel 5.7) menunjukkan bahwa variabel \hat{I} signifikan pada alpha 5% (p-value = 0,029). Adapun pengujian tanda menunjukkan bahwa variabel yang signifikan \hat{I} bertanda positif sesuai teori.

Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa investasi swasta berpengaruh positif terhadap bantuan pemerintah pusat (BP) terbukti.

2. Uji – F

Uji-F dimaksudkan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil estimasi Tabel 5.7. menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 5,546 signifikan pada taraf alpha 1% ($p\text{-value} = 0,029$). Dengan demikian maka variabel I secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen, yaitu BP.

3. Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi, bertujuan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dalam model dapat menjelaskan variabel dependennya. Hasil estimasi (lihat Tabel 5.7) dapat diketahui bahwa nilai $R^2 = 0,226$, artinya 22,6% variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen dalam model, sedangkan sisanya sebesar 77,4% dijelaskan oleh faktor lain di luar model.

5.3.2. Analisis Ekonomi

Hasil estimasi menunjukkan bahwa investasi swasta (\hat{I}) berpengaruh terhadap bantuan pemerintah pusat. Secara ekonomi dapat diinterpretasikan bahwa variabel \hat{I} dengan koefisien regresi sebesar 544,821 dan bertanda positif, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan investasi swasta sebesar Rp 1 juta akan meningkatkan penerimaan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp 544,8 juta dengan asumsi faktor-faktor lain konstan.

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Wantara (1997), yaitu bahwa investasi swasta berdampak positif terhadap bantuan pemerintah pusat.

Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Wantara (1997), yaitu bahwa investasi swasta berdampak positif terhadap bantuan pemerintah pusat.

Implikasi ekonomi dari penelitian ini bahwa dalam upaya meningkatkan bantuan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah dituntut untuk mampu menarik investasi swasta ke wilayahnya. Adapun upaya-upaya untuk menarik investasi swasta dapat dilakukan dengan cara, antara lain dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan prasarana jalan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan sesuai tujuan penelitian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah wisatawan berpengaruh kuat dan berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Propinsi Jawa Tengah dengan arah hubungan positif. Artinya semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah semakin tinggi pula penerimaan PAD di Jawa Tengah.
2. Jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah berpengaruh kuat terhadap penerimaan PAD Propinsi Jawa Tengah dengan arah hubungan positif dalam arti peningkatan jumlah kendaraan akan berdampak pada meningkatnya penerimaan PAD di Propinsi Jawa Tengah.
3. Besarnya pendapatan perkapita berpengaruh kuat terhadap penerimaan PAD Propinsi Jawa Tengah, dan berpengaruh kuat pula terhadap besarnya nilai investasi swasta di Jawa Tengah dengan arah hubungan positif. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi pendapatan perkapita semakin besar nilai investasi swasta di Jawa Tengah dan semakin besar pula penerimaan PAD Propinsi Jawa Tengah.
4. Jumlah pengeluaran untuk perbaikan prasarana jalan berpengaruh kuat dalam mendorong investasi swasta di Jawa Tengah. Hal ini bisa dimengerti, karena prasarana jalan merupakan hal yang sangat vital

untuk mendukung lancarnya transportasi produk-produk barang hasil dari investasi yang ditanamkan oleh para investor. Dengan lancarnya transportasi akan mengurangi biaya yang berarti akan meningkatkan keuntungan yang diperoleh para investor.

5. Tingkat suku bunga berpengaruh kuat terhadap investasi swasta di Jawa Tengah dengan arah hubungan negatif, artinya kenaikan suku bunga akan menyebabkan menurunnya investasi swasta. Hal ini masih sesuai dengan teori investasi yang secara sederhana menyatakan bahwa kalau suku bunga naik maka investasi akan turun.
6. Investasi swasta berpengaruh kuat terhadap bantuan pemerintah pusat di Jawa Tengah, artinya semakin besar investasi swasta di Jawa Tengah semakin besar pula bantuan pemerintah pusat di Propinsi Jawa Tengah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah propinsi Jawa Tengah relative baik dalam mendorong dan mengelola iklim investasi dan oleh karena itu sebagai insentif dari pemerintah pusat serta agar memacu daerah lain agar lebih banyak menarik para investor untuk menanamkan modal didaerahnya.

6.1.Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian dengan mengacu hasil analisis, penulis mengemukakan sejumlah saran, yaitu :

1. Untuk meningkatkan penerimaan PAD Propinsi Jawa Tengah, diperlukan upaya untuk menarik wisatawan berkunjung ke Jawa Tengah,

antara lain melalui pembenahan tempat-tempat wisata, pembangunan tempat wisata baru, menggalakkan promosi, melakukan kerjasama dengan biro-biro perjalanan, melakukan pembinaan terhadap pengusaha jasa akomodasi, serta menciptakan rasa aman dan nyaman bagi wisatawan.

2. Mengelola dengan lebih baik lagi sumber penerimaan PAD yang berasal dari kendaraan bermotor yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Memperbesar alokasi dana untuk perbaikan dan pembangunan prasarana jalan, sehingga mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Hal ini akan berdampak positif terhadap penerimaan bantuan pemerintah pusat di Jawa Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim (2001), *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*, Cetakan Pertama, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Alfian Lains (1985), Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru, *Prisma*, No.4, 1985.
- Bank Indonesia Semarang (berbagai terbitan), *Statistik Ekonomi – Keuangan Daerah Propinsi Jawa Tengah*,
- Bank Indonesia (berbagai terbitan), *Statistik Ekonomi – Keuangan Indonesia*
- Boediono (1993), *Ekonomi Makro, seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No2*. BPFE, Yogyakarta.
- Boediono (1999), *Mengenal Beberapa Metode Kuantitatif dalam Ilmu Ekonomi*. BPFE, Yogyakarta.
- Davey (1988), *Pembiayaan Pemerintah Daerah*, Penerjemah Amanullah, dkk, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Devas, Nick, Brian Binder, Anne Both, Kenneth Davey, Ropy Kelly (1989), *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerjemah Masri Maris, Universitas Indonesia (UI-PRESS), Jakarta.
- Elia Radianto (1997), Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II - Suatu Studi di Maluku, *Prisma*, 3 Maret 1997.
- Gujarati, Damodar, N. (1995), *Basic Econometric*, Third Edition, McGraw-Hill, Boston.
- Gujarati, Damodar, N., (1998), *Ekonometrika Dasar*, Alih Bahasa : Sumarno Zain, Erlangga, Jakarta
- Hendra Esmara (1970), Bantuan Pembangunan Kepada Kabupaten dan Kotamadya, *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, No.1 hlm.251-276.
- Insukindro (1993), *Ekonomi Uang dan Bank, Teori dan Pengalaman di Indonesia*, BPFE, Yogyakarta
- Ibnu Syamsi (1986), *Pokok-Pokok Kebijakan, Perencanaan, Pemrograman dan Penganggaran Pembangunan Tingkat Nasional dan Regional*, CV. Rajawali, Jakarta.

- Jawa Tengah Dalam Angka* (berbagai tahun), Bappeda Propinsi Jawa Tengah – Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
- Lincolin Arsyad (1997), *Ekonomi Pembangunan*, STE-YKPN, 1987, Yogyakarta
- Mudradjat Kuncoro (1995), *Desentralisasi Fiskal di Indonesia - Dilema Otonomi dan Ketergantungan*, *Prisma*, 4 April 1995.
- Moch. Sadli (1991), *Kumpulan Kuliah Ekonomi Industri, No. U.1.-01*, Balai Lektur Mahasiswa.
- Mudradjad Kuncoro (1997), *Ekonomi Pembangunan, Teori Masalah, dan Kebijakan*, UPPAMPYKPN, Yogyakarta.
- Musgrave, R A., and Musgrave, P B., (1989), *Public Finance in Theory and Practice*, Fifth Edition, McGraw-Hill, USA.
- Nawang Astaning Widhihastuti (2000), *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur 1987 - 1998*, Fakultas Ekonomi Universitas Surabaya.
- Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001, Tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Propinsi Jawa Tengah 2001- 2005*, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah.
- Pendapatan Regional Jawa Tengah* (berbagai tahun), Kerjasama Bappeda Propinsi Jawa Tengah dan Badan Pusat Statistik Propinsi Jawa Tengah.
- Pelatihan Praktis Ekonometrika – Aplikasi Econometric Views 3.0*, Laboratorium Studi Kebijakan Ekonomi (LKSE) Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.
- Revrison Baswir (2000), *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*, BPFE, Yogyakarta.
- Susijati B. Hirawan (1986), *Analisa tentang Keuangan Daerah Indonesia, Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, No.1 Tahun 1986.
- Sadono Sukirno (1999), *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta
- Schumacher, E .F (1979), *Kecil Itu Indah*, LP3ES, Jakarta.
- Suseno Triyanto Widodo (1990), *Indikator Ekonomi, Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, 1993, Yogyakarta
- Shaw, G.K (1987), *Hubungan Fiskal Antar Pemerintah dalam Papanek - Ekonomi Indonesia*, Penerjemah : Silvia Tiwon, Gramedia, Jakarta.

- Soetrisno, PH (1984), *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara*, Cetakan ke 3, BPFE, UGM, Yogyakarta.
- Soediyono (1997), *Ekonomi Makro*, Liberty, Yogyakarta
- Singgih Santoso (2001), *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, PT. Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Todaro, Michael P (2000), *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kelima, Penerjemah : Haris Munandar, Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2000 tentang "*Program Pembangunan Nasional Tahun 2000 - 2004*".
- Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang "*Pemerintahan Daerah*"
- Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang "*Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*".
- Wantara (1997), Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di Daerah Istimewa Yogyakarta (1970-1992), *Kinerja – Jurnal Bisnis dan Ekonomi Program Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, No.2 / Januari 1997.